

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERANAN DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN KABUPATEN KAMPAR DALAM
PEMBERDAYAAN PETANI KARET KECAMATAN KAMPAR
KIRI KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



YULIA MELBA SURIATI
NPM : 167310108

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Yulia Melba Suriati
NPM : 167310108
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar Dalam Pemberdayaan Petani Karet Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Format sistematika dan pembahasan materi bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konprehensif.

Pekanbaru, 05 Februari 2020

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing



Budi Muliando S.IP., M.Si



Andriyus S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Yulia Melba Suriati
NPM : 167310108
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar Dalam Pemberdayaan Petani Karet Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim Penguji Ujian Konfrehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 02 April 2020

Ketua


Andriyus S.Sos., M.Si

Sekretaris

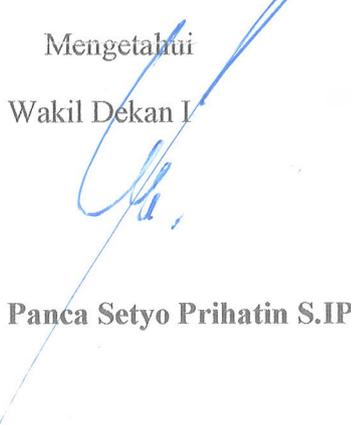

Dita Fisdian Adni S.IP., M.IP

Anggota


Dr. Sri Maulidiah S.Sos., M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan I


Dr. H. Panca Setyo Prihatin S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: *079*/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 24 Maret 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 26 Maret 2020 jam 13.00 – 14.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Yulia Melba Suriati
NPM : 167310108
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Peran Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar dalam Pemberdayaan Petani Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.**

Nilai Ujian : Angka : " *81,1* " ; Huruf : " *A-* "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Dita Fisdian, Adni, S.IP., M.IP.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Rijalul Fikri, S.Sos., M.Si.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 26 Maret 2020
An. Dekan,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Yulia Melba Suriati
NPM : 167310108
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar Dalam Pemberdayaan Petani Karet Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

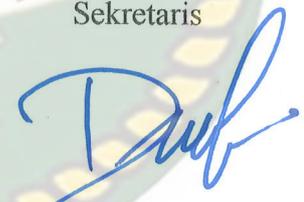
Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karna itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 02 April 2020

Ketua,

An. Tim Penguji
Sekretaris


Andriyus S.Sos., M.Si


Dita Fisdian Adni S.IP., M.IP

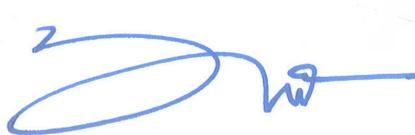
Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Ketua Program

Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.ip.,M.Si


Budi Mulianto, S.IP, M.Si

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim...

Tiada kata dan ucapan yang bisa penulis ucapkan selain puji dan rasa syukuryang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian ini dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan bisa bermanfaat bagi diri penulis, keluarga serta masyarakat dan semoga di ridhoi oleh Allah SWT. Sholawat beserta salam semoga tetap selalu tercurahkan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang istiqomah di jalan Islam.

Dan Usulan Penelitian ini diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, yaitu dengan Judul: **“Peranan Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar Dalam Pemberdayaan Petani Karet Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.”**

Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan Terima Kasih setulus-tulusnya atas segala dukungan, bantuan, dan bimbingan dari beberapa pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan Usulan Penelitian ini. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH. MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau ini.
2. Bapak Dr. Moris Adidi Yogia S.Sos., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di tempat yang beliau pimpin.
3. Bapak Budi Muliando S.IP., M.Si Selaku Ketua Program Studi dan Dosen Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi serta mengajarkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan usulan penelitian ini.
4. Bapak Andriyus S.Sos., M.Si Selaku Pembimbing I Penulis sekaligus Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan Usulan Penelitian ini.
5. Bapak Budi Muliando S.IP., M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang juga telah banyak memberikan nasehat serta ilmu pengetahuan selama masa studi.
6. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis

menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Usulan Penelitian ini.

7. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada APRIL GROUP CD PT. RAPP Pangkalan Kerinci yaitu Bapak RUDI FAJAR selaku Direktur Utama CD PT. RAPP Pangkalan Kerinci, Ibu Sundari Berlian selaku Manajer CD PT. RAPP Pangkalan Kerinci, Ibu Vonne Kandou selaku Koordinator Pendidikan CD PT. RAPP Pangkalan Kerinci yang telah berkontribusi dalam memberikan bantuan Beasiswa S1 kepada saya.
8. Terkhusus dan teristimewa buat keluarga tercinta Ayahanda (Alm) “SUHAIMI” dan Ibunda “DARNAWATI” serta Kakak “Nelvi Susanti”, Abang “Hardi Junia Putra (Alm) dan Adel Yusrianto”, Adik “Lisda Wati”, dan Tulang “Manullang James Toni” yang sangat saya sayangi, yang dengan pengertian dan kesabarannya senantiasa mendoakan, memberikan inspirasi, semangat, dukungan, support serta bantuan untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulis bermohon kepada Allah SWT semoga Keluarga tercinta saya semuanya selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan-Nya.
9. Kepada seluruh sahabat saya, yaitu Dedy Fernandes, Fitri Wiwin Sahara, Ihwil Ergusfianty, Azrika Dewita, dan seluruh teman-teman di kelas IPB angkatan 2016 serta teman seperjuangan saya dalam penerima Beasiswa dari CD PT. RAPP yakni M. Ridho Ilham, Dwi Indah Oktaviani, Rizki Rahmadhani Akhyar, dan teman-teman Kost Neiska yaitu Charla Putri Balqis dan Stef Vani Marselin yang telah banyak memberikan support dalam penyusunan Skripsi ini, penulis

mengucapkan terima kasih atas semuanya, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan sukses dimasa depan, Amin Ya Robbal'amin.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun penulisan. Hal ini karena keterbatasan kemampuan dan cakrawala berfikir serta keterbatasan waktu dan kesempatan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari Bapak/Ibu Dosen selaku pembimbing dan penguji. Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembacanya.

Pekanbaru, 05 Februari 2020

Penulis

Yulia Melba Suriati

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	21
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	21
1. Tujuan Penelitian.....	21
2. Kegunaan Penelitian.....	22
BAB II: STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	23
A. Studi Kepustakaan.....	23

1. Konsep Pemerintahan.....	23
2. Konsep Kepemimpinan.....	28
3. Konsep Kewenangan.....	31
4. Konsep Organisasi.....	33
5. Konsep Pemberdayaan.....	34
6. Konsep Pertanian.....	49
7. Konsep Peranan.....	40
B. Penelitian Terdahulu.....	42
C. Kerangka Pikir.....	45
D. Konsep Operasional.....	46
E. Operasional Variabel.....	49
BAB III: METODE PENELITIAN.....	53
A. Tipe Penelitian.....	53
B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Informan Penelitian.....	54
D. Teknik Penarikan Informan.....	55
E. Jenis Dan Sumber Data.....	56
F. Teknik Pengumpulan Data.....	56
G. Teknik Analisis Data.....	58
H. Unit Analisis Penelitian.....	59
I. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	60
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	61
A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar.....	61
1. Geografis.....	61
2. Keadaan Geografis.....	61
3. penduduk.....	63
B. Struktur Organisasi Gambaran Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar.....	65
C. Kedudukan Serta Uraian Tugas Pegawai Kantor Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar.....	66
1. Kedudukan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar.....	66

2. Uraian Tugas Pegawai Kantor Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar.....	67
D. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar.....	97

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 98

A. Identitas Informan.....	98
1. Jenis Kelamin.....	99
2. Usia Informan.....	100
3. Pendidikan Informan.....	101
4. Pekerjaan Informan.....	102
B. Peranan Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar Dalam Pemberdayaan Petani Karet Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.....	103
a. Pemungkinan.....	104
b. Penguatan.....	106
c. Perlindungan.....	109
d. Penyokongan.....	112
e. pemeliharaan.....	115
C. Hambatan-Hambatan dan Kendala Peranan Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar Dalam Pemberdayaan Petani Karet Kecamatan Kampar Kiri.....	119

BAB VI : PENUTUP..... 121

A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	122

DAFTAR KEPUSTAKAAN..... 123

LAMPIRAN..... 126

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Luas dan Produksi Perkebunan Rakyat Komoditi Karet Menurut Kecamatan Tahun 2016.....	11
I.2	Jumlah Kelompok Petani Karet Kecamatan Kampar Kiri Tahun 2017.....	14
I.3	Kegiatan Pemberdayaan Petani Karet Kecamatan Kampar Kiri.....	16
II.1	Penelitian Terdahulu Dengan Permasalahan yang Relatif Sama.....	43
II.2	Operasional Variabel Peranan Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.....	50
III.1	Jadwal Waktu Penelitian Tentang Peranan Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.....	60
IV.1	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar Menurut Kecamatan Tahun 2017.....	64
V.1	Klasifikasi Informan.....	100
V.2	Identitas Informan Berdasarkan Umur.....	101
V.3	Klasifikasi Informan Penelitian Berdasarkan Pendidikan.....	102
V.4	Klasifikasi Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pikiran Tentang Peranan Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.....	45
V.1 Struktur Organisasi Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar.....	97



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar dan pedoman wawancara tentang Peranan Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar Dalam Pemberdayaan Petani Karet Kecamatan Kampar Kiri
2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar
3. Dokumentasi Lokasi Penelitian



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Konferenhensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yulia Melba Suriati
NPM : 167310108
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar Dalam Pemberdayaan Petani Karet Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferenhensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 Maret 2020

Pelaku Pernyataan,



Yulia Melba Suriati

ABSTRACT

THE ROLE OF ANIMAL PLANTATION, ANIMAL HUSBANDRY AND HEALTH OF KAMPAR DISTRICT IN EMPOWERMENT OF RUBBER FARMERS IN KAMPAR KAMPI KAMPI KAMPAR DISTRICT

Yulia Melba Suriati

167310108

This study aims to determine the level of performance of the government apparatus through the empowerment of plantations as a supporting factor for the role of the Department of Agriculture, Animal Husbandry and Animal Health Kampar Regency in Empowering Rubber Farmers Kampar Kiri District Kampar Regency. This type of research is a descriptive survey using qualitative methods with data collection techniques carried out by observation techniques, namely research conducted by taking data taken in the form of notes or documentation by analyzing these documents on the subject under study, in-depth interviews with use interview guidelines where researchers hold direct questions and answers with several informants related to the discussion of this study. The subject of this study was the Government of the Plantation, Animal Husbandry and Animal Health Office of Kaba, Kampar Regency. From the results of the study showed that the role of the Plantation Office of the District of Kampar in Empowering Rubber Farmers of the District of Kampar Kiri in the Kampar District in accordance with the responses of respondents as a whole was in the unfavorable category. This can be seen from the rarity or lack of active extension activities carried out and groups of farmers who are less active in the development of producing good rubber (K3). The factors that become obstacles in the empowerment of rubber farmers can be analyzed through the level of desire of farmers to conduct or attend plantation empowerment activities that have started to be lacking and the low budget funds for conducting extension activities so that the extension activities have begun to be less active.

Keywords: Role, Community Empowerment, Empowerment of Farmers.

ABSTRAK

PERANAN DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN KAMPAR DALAM PEMBERDAYAAN PETANI KARET KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR

Yulia Melba Suriati

167310108

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja aparatur pemerintahan melalui pemberdayaan perkebunan sebagai faktor pendukung peranan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar Dalam Pemberdayaan Petani Karet Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Tipe penelitian ini adalah survey deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil data-data yang diambil berupa catatan atau dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen tersebut tentang subjek yang diteliti, wawancara secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara dimana peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan beberapa informan terkait pembahasan penelitian ini. Adapun subjek penelitian ini adalah Pemerintah Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar Dalam Pemberdayaan Petani Karet Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sesuai dengan tanggapan responden secara keseluruhan ialah berada pada kategori kurang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sudah jarang nya atau kurang aktif kegiatan penyuluhan yang dilakukan dan kelompok petani yang kurang aktif dalam perkembangan terhadap menghasilkan karet yang bagus (K3). Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemberdayaan petani karet tersebut dapat dianalisis melalui tingkat keinginan petani untuk melakukan atau menghadiri kegiatan pemberdayaan perkebunan sudah mulai kurang dan rendahnya anggaran dana untuk melakukan kegiatan penyuluhan sehingga sudah mulai kurang aktif kegiatan penyuluhan.

Kata Kunci : Peranan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Petani.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu Negara yang berbasis agraris, mayoritas penduduknya hidup dari hasil pertanian. Meskipun dipahami bahwa tidak sedikit pula diantara petani hanya berstatus petani penggarap dibawah 0,25 Ha. Untuk itu, sangat tepat jika pemerintah menganggarkan dalam APBN untuk pertanian. Pada zaman Soeharto Indonesia sempat menjadi salah satu Negara yang mampu untuk berswasembada beras, hal ini dapat dilihat bahwa dahulu petani Indonesia hidupnya jauh lebih makmur dari pada petani sekarang. Banyak orang yang bilang bahwa Indonesia merupakan Negara yang kaya akan hasil produksi pertaniannya, namun melihat kenyataannya masih banyak sekali orang yang mengalami kesusahan dalam memproduksi hasil tani karena dengan nilai harga jual yang masih rendah. Ini disebabkan belum meratanya nilai jual suatu produksi tani di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu tugas negara untuk mampu mensejahterakan rakyatnya.

Adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/KPTS/OT.160/4/2007, pada tanggal 13 april 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani merupakan salah satu bagian dari peranan pemerintah untuk mensejahterahkan rakyatnya dalam hal ini petani, petani diatur dan ditata dalam wadah kelompok tani ditiap desa di tingkat Kecamatan sehingga memudahkan proses pemberdayaan masyarakat tani. Dan ini juga sejalan dengan adanya Undang-

undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Petani. Kemudian dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2006 tentang Revitalisasi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (RPPK) maka pemerintah mewujudkan revitalisasi pertanian yang luas, sehingga mampu mencerdaskan para petani, dapat merubah sistem pertanian untuk lebih maju dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Dalam hal ini diperlukan perangkat penyuluh pertanian dan perkebunan yang proaktif dengan petani dan penyuluh yang profesional. Dukungan sumber daya manusia berkualitas melalui penyuluhan pertanian dan perkebunan dengan pendekatan kelompok yang dapat mendukung sistem agribisnis berbasis pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan). Sehubungan dengan hal itu perlu dilakukan pemberdayaan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan kelompok tani menjadi kelompok yang kuat dan mandiri untuk meningkatkan pendapatan petani dan keluarganya. Pemberdayaan kelompok tani diarahkan pada pemberian pelatihan dan penyuluhan, pemberian bantuan bibit dan pupuk, dan pemberian bantuan teknologi pertanian kepada kelompok tani. Selain itu pembinaan kelompok tani diharapkan dapat membantu dan menggali potensi, memecahkan masalah usaha tani anggotanya secara lebih efektif dan memudahkan dalam mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan menggunakan asas Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintahan Pusat kepada

aparatus Pemerintah Pusat yang ada di daerah untuk melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di daerah dengan kata lain Dekonsentrasi adalah perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah dan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepala daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam Penyelenggaraan Pemerintah, Negara telah memberikan kesempatan dan keluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.

Tujuan pembentukan Negara ialah untuk melindungi kepentingan Masyarakat yang dilakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah. Fungsi utama Pemerintahan adalah melakukan pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan kepada masyarakat, maka aparat yang menjalankan fungsi Pemerintahan itu adalah pengembalian tugas pelayanan kepada masyarakat. Jadi, bukan sebaliknya untuk minta dilayani oleh masyarakat. Untuk itu, Pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat dan melindungi kepentingan masyarakatnya sebagai bagian dari wujud pelayanan kepada masyarakat itu agar masyarakat dapat terpuaskan.

Selanjutnya dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.”

Dengan adanya ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagai dasar hukum untuk mengatur tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah sebagai satuan Pemerintahan Nasional.

Lahirnya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberi ruang bagi daerah sebagai daerah otonomi. Daerah otonom selanjutnya disebut otonomi daerah hal, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 tentang Pemerintahan Daerah).

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan maka Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing rendah. Sebagaimana yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut : Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Daerah dalam rangka untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan menjalankan otonomi seluas-luasnya. Adapun urusan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 9 yaitu :

1. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
2. Urusan Pemerintahan absolut sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
3. Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

5. Urusan Pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintah.

Selanjutnya dalam pasal 10 ayat (1) menjelaskan Urusan Pemerintahan

Absolut meliputi :

- a. Politik Luar Negeri;
- b. Pertanahan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan Fisikal; dan
- f. Agama

Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah pusat :

- a. Melaksanakan sendiri; atau
- b. Melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Selanjutnya dalam Pasal 11 menjelaskan Urusan Pemerintahan Konkuren meliputi :

1. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib an Urusan Pemerintahan Pilihan.

2. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
3. Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Selanjutnya Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :

- a. Tenaga Kerja;
- b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan Hidup;
- f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan Informatika;
- k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- l. Penanaman Modal;
- m. Kepemudaan dan Olahraga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan;
- r. Kearsipan.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi :

- a. Kelautan dan Perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 17 ayat (1) bahwa Daerah Berhak Menetapkan Kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pemerintahan Kabupaten Kampar dalam menghadapi Era Otonomi Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 harus mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri, diantaranya dengan dibentuk Dinas-Dinas Daerah. Dinas Daerah adalah urusan pelaksana Pemerintah Daerah pembentukan susunan organisasi dan

formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Urusan yang diselenggarakan oleh Dinas-Dinas Daerah adalah Urusan yang telah menjadi urusan rumah tangga Daerah.

Dari sejumlah urusan-urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah urusan pertanian. Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang kaya dengan lahan pertanian dan perkebunan. Kabupaten Kampar sendiri memiliki luas wilayah mencapai 10.928,20 km² atau 12,26% dari luas Provinsi Riau dengan jumlah penduduk mencapai 740.839 jiwa (2017) dengan sebaran 67 jiwa/km². Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan urusan pilihan tersebut yang diamanatkan oleh undang-undang. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kampar sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam yang cukup besar di Provinsi Riau (khususnya Pertanian dan Perkebunan).

Dinas Perkebunan merupakan salah satu dinas yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Perkebunan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar pasal 82 Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.

Telah ditetapkan susunan Organisasi Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Usaha Perkebunan terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan;
 - b. Seksi Peredaran Hasil Perkebunan;
 - c. Seksi Konservasi Lahan dan Penanggulangan Kebakaran.
4. Bidang Usaha Tani terdiri dari :
 - a. Seksi Budidaya Tanaman Perkebunan;
 - b. Seksi Sarana, Prasarana dan Pemasaran;
 - c. Seksi Penyuluhan dan Perlindungan Tanaman.
5. Bidang Peternakan terdiri dari :
 - a. Seksi Budidaya dan Pengembangan Peternakan;
 - b. Seksi Pembibitan dan Produksi;
 - c. Seksi Pakan dan Pengawasan Mutu.
6. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari:
 - a. Seksi Kesehatan Hewan;
 - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. Seksi Sumberdaya Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang mayoritas masyarakatnya menggantungkan hidupnya dalam bidang pertanian/perkebunan dan tergabung dalam kelompok tani yang tersebar di beberapa Kecamatan. Di Kecamatan Kampar Kiri sendiri terdapat beberapa kelompok tani (data awal dari Dinas Perkebunan) dan tersebar di beberapa desa yaitu yaitu Desa Lipat Kain Selatan, Desa Lipat Kain Utara, Desa Teluk Paman

Timur, Desa Kuntu, Desa Kuntu Darussalam, Desa Sei Geringging, Desa Muara Selaya. Dari data ini dapat dijelaskan bahwa kelompok tani yang ada di Kecamatan Kampar Kiri ini memerlukan peranan dari Pemerintah dalam hal ini Dinas Perkebunan dalam melakukan pemberdayaan kepada kelompok tani.

Tabel I.1 : Luas dan Produksi Perkebunan Rakyat Komoditi Karet Menurut Kecamatan Tahun 2016

Kecamatan (District)	Jumlah Petani (Farmer)	Luas Areal Perkebunan (Ha)				
		TBM	TM	TTR	Jumlah Total	Produksi (Ton)
Kampar Kiri	3.149	802	1.911	4.002	6.715	2.286
Kampar Kiri Hulu	3.551	766	12.427	2.312	15.505	13.273
Kampar Kiri Hilir	1.604	450	1.306	695	2.451	1.278
Gunung Sahilan	2.008	120	1.947	546	2.613	2.519
Kampar Kiri Tengah	1.523	296	2.101	308	2.705	2.603
XIII Koto Kampar	7.406	2.862	9.121	2.268	14.251	9.414
Koto Kampar Hulu	2.751	1.340	4.131	699	6.170	3.866
Kuok	2.526	1.107	2.351	3.661	7.119	2.276
Salu	2.046	764	1.475	617	2.856	1.791
Tapung	2.056	318	1.039	186	1.543	976
Tapung	874	82	1.165	166	1.413	1.130

Hulu						
Tapung Hilir	173	0	25	144	169	16
Bangkinang Kota	884	222	787	366	1.375	788
Bangkinang	1.627	120	1.725	387	2.232	1.569
Kampar	3.687	913	2.254	551	3.718	1.546
Kampar Timur	2.995	151	1.179	152	1.482	815
Rumbio Jaya	1.155	317	1.102	208	1.626	1.044
Kampar Utara	3.316	845	2.073	1.174	4.092	1.877
Tambang	2.721	563	3.769	695	5.026	3.130
Siak Hulu	3.006	462	4.571	408	5.441	3.761
Perhentian Raja	415	12	1.429	50	1.391	1.248
KAMPAR	49.473	12.512	57.787	19.594	89.893	57.205

Sumber Data : Kampar Dalam Angka Tahun 2016

Kelompok tani di Kecamatan Kampar Kiri ini masih memiliki berbagai persoalan diantaranya dengan rendahnya tingkat pendidikan dari anggota kelompok tani maka terkadang kurang mampu menerima inovasi baik berupa cara tanam dari pelatihan maupun penyuluhan. Banyaknya petani yang masih membeli bibit maupun pupuk di agen-agen atau distributor. Persoalan diatas mengakibatkan kesejahteraan petani hanya menjadi impian saja ketika tidak dibenahi.

Dinas perkebunan harus berperan di Kecamatan Kampar Kiri guna meningkatkan hasil produksi, dibutuhkan juga berbagai kegiatan penyuluhan, pengarahan dan bimbingan. Kelompok tani merupakan kumpulan petani yang

terlibat secara non formal atas dasar keserasian, keakraban dan kepentingan bersama serta saling percaya untuk mencapai tujuan bersama dalam melakukan usaha tani, kelompok petani juga sebagai wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani sehingga produktivitasnya meningkat, pendapatannya bertambah serta kehidupannya yang lebih sejahtera, dengan adanya kelompok tani dapat memperkuat kerjasama diantara sesama petani dalam kelompok tani serta dengan pihak lain agar usaha taninya lebih efisien serta lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Usaha yang dilaksanakan masing-masing anggota kelompok tani secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dipandang dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.

Pemberdayaan kelompok tani merupakan konsep yang dikembangkan untuk memperkuat kemandirian petani. Dimana pemberdayaan kelompok tani meliputi peningkatan pengetahuan dan kemampuan petani melalui penyuluh dan pelatihan, pengembangan jaringan usaha melalui kerjasama, koordinasi dan komunikasi serta peningkatan peran pembinaan melalui motivasi, fasilitasi dan bimbingan teknis. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 273/KPTS/OT.160/4/2007 tentang pedoman penumbuhan pengembangan kelompok tani dan gabungan kelompok tani, menjelaskan pada tanggal 11 juni2005 Presiden RI telah mencanangkan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) sebagai salah satu *triple track* strategi dari Kabinet Indonesia

Bersatu dalam rangka pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan daya saing ekonomi nasional dan menjaga kelestarian sumberdayapertanian, perikanan dan kehutanan. Kelompok tani sangat berperan dalam menjembatani dan menerjemahkan program-program pemerintah dibidang peningkatan produksi pertanian. Dengan demikian, pembinaan kelompok tani dipedesaan merupakan hal penting dalam rangka membangkitkan, mengembangkan dinamika dan kemandirian kelompok tani di pedesaan.

Dalam hal ini kelompok tani merupakan kumpulan petani-petani yang tumbuh berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya. Dengan adanya kelompok tani maka akan ada kemudahan petani dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada bidang pertaniannya, selain itu juga dapat memberikan kelanggengan usaha pada petani serta lebih terorganisir lagi terhadap petani. Sehingga petani dapat lebih kreatif dan mandiri dalam pengelolaan pertanian selain itu juga petani dapat meningkatkan produksi pertaniannya dengan semaksimal mungkin.

Tabel I.2 : Jumlah Kelompok Petani Karet di

Kecamatan Kampar Kiri Tahun 2017

No	Nama Desa	Jumlah Kelompok Tani karet	Total Petani Karet (KK)	Total Luas Lahan (Ha)
1.	Kelurahan Lipat Kain	-	-	-
2.	Lipat Kain Selatan	3	113	143

3.	Lipat Kain Utara	1	30	30
4.	Sungai Geringging	1	40	40
5.	Sungai Paku	2	60	60
6.	Sungai Harapan	-	-	-
7.	Teluk Paman	-	-	-
8.	Teluk Paman Timur	2	50	50
9.	Kuntu	1	25	50
10.	Kuntu Darussalam	1	35	35
11.	Padang Sawah	-	-	-
12.	Domo	-	-	-
13.	Sungai Sarik	-	-	-
14.	Sungai Raja	-	-	-
15.	Sungai Rambai	-	-	-
16.	Tanjung Mas	-	-	-
17.	Tanjung Harapan	-	-	-
18.	Muara Selaya	1	40	40
19.	Sungai Liti	-	-	-
20.	IV Koto Setingkai	-	-	-
Jumlah		12	393	448

Sumber Data: UPT Perkebunan Kecamatan Kampar Kiri

Adapun bentuk dari pemberdayaan tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan geografisnya dan dapat juga dilakukan melalui adanya bimbingan serta pengarahan kepada

masyarakat agar dapat terampil sesuai dengan keahliannya. Adapun uraian kegiatan dari pemberdayaan petani karet yang ada di Kecamatan Kampar Kiri.

Tabel 1.3 : Kegiatan Pemberdayaan Petani Karet Kecamatan Kampar

Kiri

no	Tanggal	Kegiatan Pemberdayaan Petani Karet Kecamatan Kampar Kiri
1	28 Februari 2017	Melakukan penyuluhan dan pembuatan proposal pengajuan dana untuk kegiatan petani karet
2	31 Mei 2016	Menyampaikan kegiatan penyuluhan dan membahas utang pinjaman yang dilakukan anggota KUB
3	28 Mei 2015	Penyampaian tentang harga karet / bokar dengan K3 (Kadar Karet Kering)
4	28 Maret 2015	Penyampaian tentang informasi bantuan motor roda 3 serta cara pemakaiannya
5	27 Februari 2015	Menyampaikan rencana kedatangan tamu dari Bangkinang dan Pekanbaru

Sumber Data : UPT Perkebunan Kecamatan Kampar Kiri

Salah satu daerah yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah adalah Kabupaten Kampar. Dimana di Kabupaten Kampar terdapat beberapa Kecamatan yang salah satunya adalah Kecamatan Kampar Kiri dengan memiliki luas 915,33 Ha atau sekitar 8,11 persen dari total wilayah Kabupaten Kampar. Kecamatan Kampar Kiri terdiri dari 20 desa/kelurahan dengan satu Kelurahan yaitu Kelurahan Lipat Kain dan 19 desa lainnya adalah Domo, IV Koto Setingkai, Kuntu, Kuntu Darussalam, Lipat Kain Selatan, Lipat Kain Utara, Muara Selayah (Muara Selaya), Padang Sawah, Sungai Geringging, Sungai Harapan, Sungai Paku, Sungai Raja, Sungai Rambai, Sungai Sarik, Sungai

Liti, Tanjung Harapan, Tanjung Mas, Teluk Paman, Teluk Paman Timur. Penduduk Kecamatan Kampar Kiri keadaan akhir tahun 2015 menurut proyeksi penduduk adalah 28.690 jiwa yang terdiri dari 14.804 laki-laki dan 13.886 perempuan. Berdasarkan jumlah data penduduk Kecamatan Kampar Kiri merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk yang besar, dengan jumlah penduduk yang besar tersebut diperlukan langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya pengangguran dalam masyarakat tersebut. Untuk tercapainya kemakmuran masyarakat Kecamatan Kampar Kiri maka diperlukan Peranan Dinas Perkebunan, yang salah satunya mengenai pemberdayaan masyarakat dalam hal pertanian.

Dengan keberadaan kelompok tani pada daerah tersebut maka diharapkan akan tumbuh rasa keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya, serta dapat juga mensejahterakan anggota keluarganya. Dalam peningkatan kesejahteraan petani melalui kelompok tani banyak aspek yang harus diperhatikan baik itu produktivitas usaha tani maupun intensitas tanam serta peningkatan akses petani ke pasar *input* sehingga mendatangkan *output* yang efisien.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau atau proses untuk menumbuh kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, memelihara, melindungi dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Kartasmita dalam Zubaedi (2013:79) mengemukakan bahwa upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara yaitu :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang (*enabling*). Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat dari kemandirian dan keberdayaan masyarakat adalah keyakinan dan potensi kemandirian tiap individu perlu untuk diberdayakan. Proses pemberdayaan masyarakat berakar kuat pada proses kemandirian setiap individu yang kemungkinan meluas pada keluarga, serta kelompok masyarakat baik ditingkatkan lokal maupun nasional.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*) dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana yang baik fisik (irigasi, jalan, listrik), maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Terbentuknya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini yang penting antara lain adalah peningkatan mutu dan perbaikan sarana pendidikan kesehatan, serta akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.
3. Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi (*protection*) dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah

bertambah lemah atau mungkin tersingkirkan dalam menghadapi yang kuat oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat, melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

Kegiatan pengembangan masyarakat merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan suatu kelompok tertentu disuatu daerah. Pengembangan masyarakat tersebut biasa dikenal sebagai Pemberdayaan (*Empowerment*) masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sesungguhnya bertujuan untuk mewujudkan terciptanya masyarakat yang mandiri, mampu menggali serta memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya, dan mampu membantu masyarakat agar terbebas dari keterbelakangan ataupun kemiskinan. Setiap daerah memiliki potensi, kondisi daerah, dan karakteristik yang berbeda-beda. Untuk itu dalam upaya pemberdayaan, masyarakat daerah setempat harus lebih banyak terlibat dalam proses kegiatan tersebut, pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator yang mendukung program pemberdayaan tersebut. Pemberdayaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, karena yang menjadi subyek dari pemberdayaan adalah masyarakat daerah itu sendiri. Suhendra (2006:74-75) berpendapat bahwa “Pemberdayaan merupakan Suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong ketertiban semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi”.

Suatu pemberdayaan akan berhasil bila masyarakat tahu dan mengerti apa yang seharusnya ia lakukan sebagai bagian dari penggerak pembangunan masyarakat. Untuk menciptakan hal tersebut maka diperlukan suatu konsep pemberdayaan terhadap masyarakat yang ada di daerah tersebut agar dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang di emban kepadanya.

Pentingnya pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, berbagai persoalan kemiskinan yang terjadi didalam masyarakat menuntut adanya solusi untuk dapat keluar dari garis kemiskinan tersebut. Strategi yang memungkinkan dapat diterapkan di Indonesia adalah Pembredayaan Masyarakat, melalui kegiatan-kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat tersebut diharapkan masyarakat dapat mandiri dalam mengatasi persoalan hidup mereka dan meningkatkan kualitas diri mereka untuk dapat bertahan dalam segala situasi.

Alasan penulis melakukan penelitian ini ialah karna untuk menambah wawasan penulis dan rasa keingintahuan penulis terhadap obyek yang ingin penulis teliti. Adapun fenomena yang penulis temui dilapangan yaitu :

1. Terindikasinya petani karet karena banyak petani menggunakan obat untuk menguras isi batang karet sehingga obat itu tidak baik karena bisa membuat unsur batang karet berkurang dan bisa membuat batang karet berumur pendek;
2. Kesulitannya petani karet mencari bibit sehingga masyarakat banyak beralih fungsi ke sawit.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang penulis temui dilapangan membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Hal inilah yang membuat peneliti merasa tertarik untuk meneliti bagaimana sebenarnya Peranan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar Dalam Memberdayakan Kelompok Tani Di Kecamatan Kampar Kiri. Berdasarkan uraian latar belakang diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai **“Peranan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar Dalam Pemberdayaan Petani Karet Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar”**.

B. Rumusan Masalah

Guna mendukung keberhasilan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik maka Kepala Dinas dituntut mampu memberdayakan masyarakat Kecamatan Kampar Kiri agar segala aspek ekonomi kehidupan ditengah masyarakat terlaksana dengan baik dan terarah oleh karena itu penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimana Peranan Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar Dalam Memberdayakan Masyarakat Petani Karet di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Dalam Melakukan Pembinaan Guna Meningkatkan Produksi Perkebunan”? dan “Apa Saja Yang Menjadi Hambatan Dalam Peranan Dinas Perkebunan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Petani Karet di Kecamatan Kampar Kiri”?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peranan Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar terhadap memberdayakan masyarakat petani karet di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui hambatan/masalah-masalah yang dihadapi oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar dalam memberdayakan masyarakat petani karet di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis, penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang Ilmu Pemerintahan;
- b. Secara Praktis, sebagai bahan masukan bagi Dinas Perkebunan dalam Memberdayakan Petani Karet di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- c. Secara Kontribusi, dapat menjadi salah satu bahan referensi untuk mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi kepustakaan

Dalam penulisan ini penulis mengemukakan beberapa teori para ahli yang erat kaitannya dengan pemecahan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini, adapun dalam mengemukakan teori-teori tersebut adalah sebagai kerangka pikiran yang akan memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di tegaskan, pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan kewenangan, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

1. Konsep Pemerintahan

Pengertian pemerintahan dan pemerintah terdiri dari dua konsep yaitu dalam arti luas dan sempit. Pemerintah dalam arti luas ialah mencakup semua alat kelengkapan negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang – cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial atau alat – alat kelengkapan negara lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti yang sempit yaitu aparatur / alat kelengkapan negara yang hanya mempunyai tugas dan kewenangan/kekuasaan eksekutif saja.

Menurut Ndraha (2011:7) menjelaskan bahwa Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan

melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. .

Menurut Syafiie (2010:23) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (Eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahan dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya (“sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat dibutuhkan”, jadi normatif, ideal, das sollen), kemudian dari sudut yang kedua yaitu bagaimana senyatanya (“pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan”, apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak, jadi empirik, das sein).

Jadi ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), kepemimpinan dan koordinasi secara baik dan benar antara yang memerintah dengan yang di perintah.

Bersamaan dengan munculnya negara sebagai organisasi terbesar yang relatif kokoh dalam kehidupan bermasyarakat. Maka pemerintahan mutlak harus ada untuk membarenginya. Yaitu munculnya keberadaan dua kelompok orang yang memerintah di satu pihak dan yang di perintah di lain pihak.

Hubungan antara yang memerintah dan di perintah itulah yang menjadi objek pemerintahan, karena dalam hubungan-hubungan tersebut akan ditemui berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan.

Menurut Syafi'i (2007:4) secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang di perintah memiliki kepatuhan akan keharusan;
2. Setelah di tambah awalan "pe" menjadi pemerintah. Yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah;
3. Setelah di tambah lagi akhiran "an" menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Kemudian menurut Ndraha (2005:36) pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah adalah proses pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Apabila ditinjau dari segi pemerintah, pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang sedikit kata "perintah" tersebut memiliki empat unsur yaitu : ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Syafi'i (2005:20) .

Menurut Sedarmayanti (2003:35) pemerintahan atau government adalah lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau negara kota dan sebagainya, sedangkan pemerintahan adalah tidak dari penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan menurut Ndraha (2003:5) mengatakan bahwa pemerintahan adalah suatu sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan tertentu yang di perintahkan akan jasa publik dan pelayanan sipil, sedangkan pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintah.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi hakiki pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan terbagi menjadi 3 (tiga) fungsi menurut Rasyid dalam Labolo (2001:36) yaitu :

1. Fungsi Pelayanan;

Secara umum pelayanan yang dilakukan pemerintah meliputi pelayanan publik dan pelayanan sipil yang mengedepankan kesetaraan. Beberapa pelayanan yang dilakukan pemerintah pusat mencakupi masalah hubungan luar negeri, peradilan, keuangan, agama, pertahanan dan keamanan.

2. Fungsi Pemberdayaan;

Fungsi pemberdayaan ini bertujuan untuk mendukung otonomi daerah sehingga masing-masing daerah dapat mengelola sumber daya secara maksimal. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pemerintah daerah harus meningkatkan

peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

3. Fungsi Pembangunan.

Pemerintah juga berfungsi sebagai pemacu pembangunan baik dipusat maupun di daerah-daerah. Pembangunan yang dimaksud disini adalah pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan mental spiritual warga negara.

Selanjutnya menurut Syafi'i (2013:20) pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena memiliki syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek material maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas).

Pemerintahan dapat ditinjau dari tiga aspek yaitu dari kegiatan (dinamika), segi struktural fungsional, dan dari segi tugas dan kewenangan (fungsional).

Pertama apabila ditinjau dari segi dinamika, pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara.

Kedua dari segi struktural fungsional, pemerintahan berarti seperangkat fungsi negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara.

Sedangkan *ketiga* dari segi tugas kewenangan negara maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan negara.

Menurut ketiga batasan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa pemerintahan merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan negara, maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan wewenang Negara.

Dalam rangka untuk menjaga keseimbangan menjalankan roda pemerintahan maka lahirlah teori kekuasaan yang dikenal dengan teori *Trias Politica* yang dikemukakan oleh Montesquie yaitu kekuasaan legislatif artinya kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang, kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan mengadili pelanggaran terhadap undang-undang.

2. Konsep Kepemimpinan

Kartini Kartono (2009:6) Kepemimpinan adalah masalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang sebagai hasil dari interaksi otomatis diantara pemimpin dan individu-individu yang dipimpin untuk mengajak, memengaruhi dan menggerakkan orang-orang lain guna melakukan sesuatu, demi pencapaian tertentu.

Rivai (2008:3) kepemimpinan pada hakikatnya adalah :

1. Proses mempengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi;

2. Seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan dan kerjasama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama;
3. Kemampuan untuk mempengaruhi, memberi inspirasi, dan mengarahkan tindakan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan;
4. Melibatkan tiga hal yaitu pemimpin, pengikut dan situasi tertentu;
5. Kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Sumber pengaruh dapat secara formal dan informal.

Siagian (2003:5) mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan inti dari manajemen yakni sebagai motor penggerak bagi sumber-sumber dan alat-alat bagi organisasi. Sukses tidaknya organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan tergantung atas cara-cara memimpin yang diterapkan oleh pimpinan tersebut.

Secara operasional dapat dibedakan dalam 5 (lima) fungsi pokok kepemimpinan yaitu :

a. Fungsi intruksi

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana dan dimana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.

b. Fungsi konsultasi

Fungsi ini bersifat dua arah, pada tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan, tahap berikutnya konsultasi dari pimpinan dari

orang-orang yang dipimpin dapat dilakukan setelah keputusan ditetapkan dan sedang dalam pelaksanaan.

c. Fungsi partisipasi

Dalam menjalankan fungsi ini pimpinan berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya.

d. Fungsi delegasi

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan ataupun tanpa persetujuan dari pimpinan.

e. Fungsi pengendalian

Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses atau efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal.

Kriteria kepemimpinan secara singkat dapat dikemukakan bahwa pemimpin yang efektif adalah yang jujur, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, integritas, vitalitas fisik dan mental, kecerdasan, kearifan, bertanggungjawab, kompeten, memahami kebutuhan pengikutnya, keterampilan interpersonal, kebutuhan untuk berprestasi, mampu memotivasi dan memberi semangat, mampu memecahkan masalah, meyakinkan, memiliki kapasitas untuk menang, memiliki kapasitas untuk memutuskan menentukan prioritas, mampu memegang kepercayaan, memiliki pengaruh mampu beradaptasi atau memiliki fleksibilitas.

Seorang pemimpin yang mampu dan sukses dalam menjalankan tugasnya, dapat dilihat dari sifat-sifat dan kualitas perilakunya yang dipakai sebagai kriteria untuk menilai kepemimpinannya. Dalam kegiatannya dengan keberhasilan kepemimpinan organisasi, Keith Daviz dalam Thoha (2007:33) merumuskan empat sifat umum yang tampaknya pengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi yaitu :

1. Kecerdasan;
2. Kedewasaan dan keluasan hubungan sosial;
3. Motivasi diri dan dorongan berprestasi;
4. Sikap-sikap hubungan kemanusiaan.

3. Konsep Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan tata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.

Sedangkan menurut H.D Stout dalam Ridwan Hr (2013:71) wewenang adalah seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar pasal 5 Peraturan Bupati Kampar Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar, Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural

dilingkungan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar yaitu :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati untuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perkebunan dan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan dibidang usaha Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - c. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pengembangan dibidang Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - d. Melaksanakan pembinaan dibidang Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - e. Pengembangan sarana dan prasarana serta pengawasan sarana Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - f. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanam, bibit Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - g. Pembinaan produksi di bidang Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - h. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman, ternak dan hewan serta masyarakat;

- i. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- j. Pemberian izin usaha / rekomendasi teknis perkebunan;
- k. Pemantauan dan evaluasi dibidang Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- l. Pelaksanaan administrasi Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;
- n. Pengelolaan UPT Dinas (UPTD).

Dari keterangan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh setiap individu-individu baik itu perorangan, kelompok, lembaga dan institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

4. Konsep Organisasi

Organisasi berasal dari bahasa inggris yaitu *organization* yang berakar dari latin *organiz (are)*, kemudian dalam bahasa inggris "*organize*" yang berarti membangun (membentuk) suatu kebulatan (kesatuan) dan bagian-nagian yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Jika dilihat dari segi ini maka organisasi bisa berarti *organism* yang melakukan *organizing* dan juga berarti keluaran (produk, output) *organizing*.

Menurut Winardi (2009:43) organisasi merupakan suatu wadah untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan yang terdiri dari sekelompok manusia

yang diharapkan dapat bekerjasama sehingga sasaran-sasaran tertentu dapat dicapai secara bersama. Setiap organisasi merupakan suatu kesatuan yang berupaya untuk mengkoordinasi berbagai macam kepentingan, dibentuk untuk mencapai aneka macam tujuan dan sasaran. Organisasi ada yang bersifat sederhana dan ada pula yang bersifat kompleks.

Kelangsungan suatu organisasi dalam usaha mencapai suatu tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan, tidak terlepas dari adanya peranan dari segenap anggota organisasi yang mampu melaksanakan tugasnya, sehingga dapat dikatakan bahwa anggota organisasi merupakan salah satu sumber daya manusia yang mendukung suatu organisasi.

5. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga miskin untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam konsep pemberdayaan, menurut Prijono dan

Pranarka (1996), manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal. Menurut Sumodiningrat (1999), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Edi Suharto (2006:58–59) mendefinisikan pemberdayaan anatara lain sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
- b. Pemberdayaan adalah suatu proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi terhadap kaejadian – kejadian serta lembaga – lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan nama rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Kemudian Edi Suharto (2006:67–68) menjelaskan bahwa pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan berikut :

1. Pemungkinan : menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat – sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. Penguatan : memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan : melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan

segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

4. Penyokongan : memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas – tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan : memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan kesimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Pasal 1, ayat (8).

Upaya pemberdayaan, seperti yang dikatakan Kartasmita harus dilakukan melalui tiga arah, yaitu :

Pertama, menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Artinya setiap manusia atau setiap masyarakat telah memiliki potensi, sehingga pada saat langkah pemberdayaan diupayakan agar mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengembangkan potensi-potensi yang telah dimiliki.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Artinya langkah pemberdayaan diupayakan melalui aksi-aksi nyata seperti pendidikan, pelatihan, peningkatan kesehatan, pemberian modal, informasi, lapangan kerja, pasar serta sarana prasarana lainnya.

Ketiga, melindungi masyarakat (protection). Hal ini berarti dalam pemberdayaan masyarakat perlu diupayakan langkah-langkah yang mencegah persaingan secara tidak seimbang serta praktek eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah, melalui keberpihakan atau adanya aturan atau kesepakatan yang jelas dan tegas untuk melindungi golongan yang lemah.

Langkah-langkah perencanaan program program itu setidaknya-tidaknya mempunyai enam tahap, yaitu

1. Tahap problem posing (pemaparan masalah) yang dilakukan dengan mengelompokkan dan menentukan masalah-masalah dan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, dengan memfasilitasi kegiatan musyawarah atau diskusi dalam kelompok atau komunitas;
2. Tahap problem analysis (analisis masalah). Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi ruang lingkup permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat;
3. Tahap penentuan tujuan (aims) dan sasaran (objectives);
4. Tahap action plans (perencanaan tindakan). Tahap ini dilakukan dengan perencanaan berbagai aksi untuk mencapai tujuan;

5. Tahap pelaksanaan kegiatan. Tahap ini dilakukan dengan mengimplementasikan langkah-langkah penembangan masyarakat yang telah dirancang;
6. Tahap evaluasi yang dilakukan secara terus menerus, baik secara formal maupun informal.

6. Konsep Pertanian

Pertanian memiliki arti penting dalam pembangunan perekonomian. Sektor pertanian tidak saja sebagai penyedia kebutuhan pangan melainkan sumber kehidupan. Pertanian juga merupakan sumber pendapatan ekspor serta pendorong dan penarik tumbuhnya sektor-sektor ekonomi, dapat meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, mengatasi kemiskinan dan pengangguran serta dapat mensejahterakan masyarakat.

Menurut Faizah (2005) petani adalah setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan kehidupannya dibidang pertanian. Menurut Sutomo (2004) petani adalah orang yang menggarap, mengelola tanah milik sendiri bukan milik orang lain.

Menurut Pertiwi (2013) secara umum petani dibedakan menjadi beberapa, yaitu petani pemilik lahan, petani penyewa lahan, petani penggarap, dan buruh tani.

1. Petani pemilik lahan adalah petani yang mempunyai lahan sendiri dan bertanggungjawab atas lahannya. Sehingga petani pemilik lahan mempunyai hak atas lahannya untuk memanfaatkan lahannya seperti penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang dilakukan sendiri.

2. Petani penyewa adalah petani yang menyewa tanah orang lain untuk kegiatan pertanian. Besarnya biaya sewa tergantung pemilik tanah yang menentukan besarnya biaya sewa.
3. Petani penggarap adalah petani yang menggarap tanah orang lain dengan sistem bagi hasil. Resiko usahatani yang ditanggung bersama dengan pemilik tanah dan penggarap dalam sistem bagi hasil. Besarnya bagi hasil tidak sama tergantung daerah masing-masing.
4. Buruh tani adalah petani yang menggarap atau bekerja di tanah orang lain untuk mendapatkan upah kerja. Hidupnya tergantung pada pemilik sawah yang memperkerjakannya.

Dalam berusahatani, petani memerlukan lahan untuk bercocok tanam guna menghasilkan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik yang mempunyai lahan atau yang tidak mempunyai lahan sebagai mata pencaharian untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jadi antara petani dan pertanian tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena pertanian bukan hanya untuk menghasilkan pendapatan ekonomi petani saja. Karena dari pertanian, petani akan memperoleh hasil yang setinggi-tingginya dari usahatannya

7. Konsep Peranan

Peranan menurut Poerwadarminta (1995:751) adalah “tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa” berdasarkan pendapat di atas, peranana adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat.

Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) pengertian peranan adalah sebagai berikut: peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan.

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) peranan mencakup tiga hal, yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Soerjonon Soekanto (2002:243) pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat, penting bagi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya;
- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya;

- c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak;
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang.

begitu pentingnya peranan sehingga dapat menentukan status kedudukan seseorang dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ilmu yang dalam cara berpikir menghasilkan kesimpulan berupa ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan, dalam proses berfikir menurut langkah-langkah tertentu yang logis dan didukung oleh fakta empiris dan juga sebagai dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian dahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah pemberdayaan masyarakat tani.

Tabel. II.1: Penelitian Terdahulu Dengan Permasalahan yang Relatif Sama

Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4
Puput Hardiani/2015	Peran Dinas Pertanian dan Kehutanan dalam Pemberdayaan Petani Karet di Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan	Sama-sama menggunakan teori peranan dan pemberdayaan	Lokasi penelitian berbeda Tahun penelitian berbeda
Sohidin/2017	Analisis Pelaksanaan Fungsi Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pembinaan Pertanian (Studi di Kecamatan Rimba Melintang)	Sama-sama meneliti dalam bidang pertanian atau perkebunan	Meneliti analisis pelaksanaan fungsi dinas dalam pebinaan, sedangkan peneliti meneliti tentang peranan dinas dalam pemberdayaan
Gleydis Susanti Oroh/2014	Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di	Memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang pemberdayaan masyarakat petani	Yang berperan dalam penelitian terdahulu adalah pemerintah desa sedangkan dalam

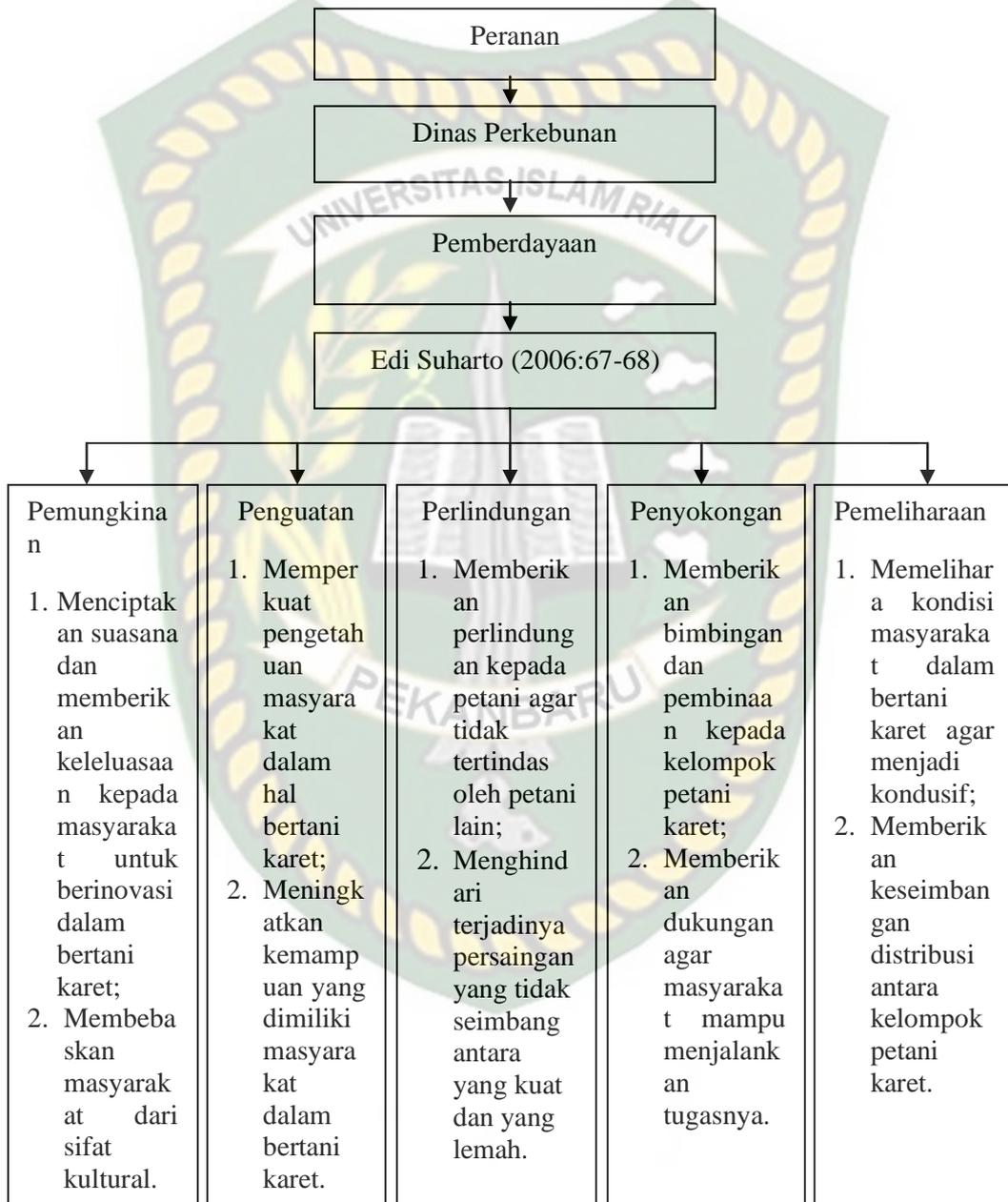
	Bidang Pertanian di Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa	dan juga sama-sama memakai teori peranan	penelitian penulis yang berperan adalah Dinas Perkebunan
--	---	--	---

Sumber : Sumber Modifikasi Penulis 2019

Adapun rencana yang akan penulis teliti berbeda dengan penelitian yang sudah ada adapun bedanya adalah penulis meneliti Peranan Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar Dalam Pemberdayaan Petani Karet Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dengan memakai teori peranan dan indikator pemberdayaan.

C. Kerangka Pikir

Gambar II.1: Kerangka Pikiran Tentang Peranan Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar Dalam Pemberdayaan Petani Karet Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar



Sumber Data: modifikasi Penelitian 2019

D. Konsep Operasional

Untuk menyatukan pandangan dan mempermudah penilaian serta menghindari salah pengertian dan pemahaman, maka perlulah kiranya penulis memaparkan penjelasan tentang Peranan Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, yaitu sebagai berikut :

1. Peranan yang dimaksud adalah suatu usaha atau kemampuan diri orang – orang yang menduduki jabatan untuk dapat menggerakkan serta menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat dalam mencapai suatu tujuan
2. Pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan akan jasa publik dan layanan sipil.
3. Dinas merupakan unsur pelaksanaan Otonomi Daerah dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah.
4. Dinas Perkebunan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
5. Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar adalah merupakan lembaga teknis daerah, lembaga teknis daerah adalah salah satu unsur pendukung tugas Bupati yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam hal ini kebijakan dibidang Perkebunan.

6. Wewenang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disamakan dengan tata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.
7. Kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
8. Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekumpulan manusia yang bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan tertentu.
9. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian bisa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam.
10. Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga miskin untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakatnya.

11. pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.
12. Pemungkinan adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat – sekat kultural dan struktural yang menghambat.
13. Penguatan adalah memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
14. Perlindungan adalah melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
15. Penyokongan adalah memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas – tugas kehidupannya.

Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

16. Pemeliharaan adalah memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan kesimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.
17. Pemberdayaan masyarakat petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.
18. Penyuluhan pertanian adalah sistem pendidikan di luar sekolah (*non formal*), bagi petani dan keluarganya agar berubah perilakunya untuk bertani lebih baik (*better farming*), berusaha tani yang lebih menguntungkan (*better bussines*), hidup lebih sejahtera (*better living*), dan bermasyarakat lebih baik (*better community*) serta menjaga kelestarian lingkungannya (*betterenvironment*).

E. Operasional Variabel

Operasional variabel adalah cara memberikan arti atau mendeskripsikan (penggambaran) dari suatu variable kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan) yang diperlukan untuk mengatur variabel tersebut. Sedangkan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai.

		<p>3. Perlindungan</p> <p>4. Penyokongan</p>	<p>pengetahuan masyarakat dalam hal bertani karet</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam betani karet</p> <p>a. memberikan perlindungan kepada petani agar tidak tertindas oleh petani lain</p> <p>b. menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan yang lemah</p> <p>a. memberikan bimbingan dan pembinaan kepada kelompok petani karet</p> <p>b. memberikan</p>
--	--	--	---

		5. pemeliharaan	<p>dan meningkatkan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan tugasnya dalam betani karet</p> <p>a. memelihara kondisi masyarakat dalam betani karet agar menjadi konduif</p> <p>b. memberikanke seimbangan distribusi antara kelompok petani karet</p>
--	--	-----------------	--

Sumber data : Modifikasi Penelitian Tahun 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif Kualitatif, artinya suatu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa untuk diambil kesimpulan secara umum.

Menurut Denzin & Lincoln (1994) dalam Ahmadi (2016 : 14) mengemukakan bahwa peneliti Kualitatif adalah multimetode dalam fokus, termasuk pendekatan interpretif dan naturalistik terhadap pokok persoalannya. Ini berarti para peneliti kualitatif menstudi segala sesuatu dalam latar alamiahnya, berusaha untuk memahami atau menginterpretasi fenomena dalam hal makna-makna yang orang-orang berikan pada fenomena tersebut. Oleh karena itu menfokuskan pada penggambaran dan pemecahan yang dianalisa secara deskriptif kualitatif. Adapun tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah :

- a. Untuk menggambarkan dengan lebih teliti ciri-ciri individu, situasi atau kelompok.
- b. Penelitian deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, karena banyak sekali ragam penyelidikan demikian, metode penyelidikan deskriptif lebih merupakan secara umum, yang

mencakup berbagai teknik survey dengan teknik interview, angket, observasi atau tes, studi kasus, studi komparatif atau operasional. (Winarmo & Surakhmad, 1995 : 131).

Dengan memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang sesuai dengan situasi substansial yang dihadapi, untuk itu perlu data yang akurat dan harus dikumpulkan dan kemudian dianalisa secara sistematis demi ketetapan dalam pengkajiannya.

B. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis memilih objek penelitian pada Instansi Pemerintahan Dinas Perkebunan di Kabupaten Kampar.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah sumber informasi yang di peroleh oleh peneliti melalui orang-orang yang terlibat dalam proses tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar. Menurut Bagong Suyanto (2005:172) informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu:

1. Informan kunci (key informan) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian;
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti;

3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Teknik pengambilan informan penelitian dilakukan dengan menggunakan purposive sampling technique yaitu cara penentuan informasi yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu, yaitu melalui orang-orang yang terlibat langsung dalam proses tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar, pemilik perkebunan dan masyarakat tani setempat.

Adapun informan eks penelitian ini adalah :

- a. Kepala KUB
- b. Anggota kelompok petani
- c. Petani mandiri

Sedangkan key informan ini adalah :

- a. Petugas Lapangan PPL Kecamatan Kampar Kiri

D. Teknik Penarikan Informan

Dalam wawancara yang dilakukan dengan informan, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*, metode ini adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud seperti orang yang dianggap paling tahu tentang apa saja yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti, Sugiyono (2012:54).

Untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan informan/responden yang bertindak sebagai sumber data dan indorman terpilih serta yang bersangkutan dengan penelitian ini.

E. Teknik Penentuan

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung yang terdiri dari beberapa indikator yang memperoleh hasil analisa yang jelas juga hasil penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh dari Observasi dan Wawancara.

2. Data Skunder

Data skunder merupakan data pendukung yang penulis peroleh dari Dinas Perkebunan Kabupeten Kampar yang terdiri dari :

- a. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan;
- b. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan;
- c. Data-data yang lain menurut penulis dapat melengkapi penelitian ini nantinya;
- d. Dokumentasi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara yang di pakai penulis dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah :

1. Observasi

Menurut Husaini Usman (2009:52). Teknik Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan cara danting, pendekatan, dan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data-data awal dan data sekunder dari kantor Dinas Perkebunan.

Observasi dilakukan guna mengetahui sifat-sifat individu secara langsung maupun dengan terlibat langsung dalam kegiatan yang dilaksanakan ataupun dengan pengamatan secara tidak langsung. Penerapannya dilapangan adalah melakukan kunjungan ke daerah penelitian dan mencari data awal sebagai landasan pembuatan proposal. Didalam observasi ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek yang akan diadakan penelitian. Dengan observasi tersebut penulis dapat mengetahui secara langsung kejadian yang sesungguhnya dilapangan, yang terdiri dari kondisi pertanian baik dari lingkungan maupun kegiatan penyuluhan pemberdayaan pertanian di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

2. Wawancara (Interview)

Menurut Riduwan (2009 : 29) “ Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya”. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan tanya jawab langsung Face To Face kepada pihak-pihak yang terkait dengan alasan sumber peneliti informasi untuk memperoleh data mengenai Peranan Dinas Perkebunan Dalam Pemberdayaan Petani Karet Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2009 : 82), Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan dan mengumpulkan data yang diidentifikasi dari dokumentasi adalah yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti penulis. Dokumentasi merupakan bukti fisik dari penelitian ini, berupa foto-foto penelitian dan surat-surat yang telah diperoleh selama penulis melakukan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah metode Deskriptif yaitu cara penganalisaan yang dilakukan dengan menggambarkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan variabel dan indikator penelitian, tanggapan masyarakat dan berdasarkan penilaian peneliti.

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan menurut masing-masing variabel beserta indikatornya. Kemudian data dianalisa secara Kualitatif, yaitu suatu penilaian yang menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa untuk diambil kesimpulan secara umum dengan penjelasan secara interpretatif yaitu usaha pengambilan kesimpulan berdasarkan pemikiran dan perkiraan logis atas dasar yang diperoleh, terutama untuk mengetahui bagaimana gambaran umum tentang Dinas

Perkebunan Dalam Pemberdayaan Petani Karet Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

H. Unit Analisis Penelitian

Unit analisis merupakan sesuatu yang berkaitan dengan fokus yang teliti. Unit analisis merupakan suatu penelitian yang dapat berupa benda, individu, kelompok, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus penelitiannya. Pada penelitian ini kualitatif pada dasarnya analisis data menggunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogy, komparasi dan sejenisnya, Suprayogo dan Tobroni (2011:48).

Dalam penelitian ini analisisnya adalah Dinas Perkebunan dengan Masyarakat Petani Karet dalam hal Pemberdayaan. Dalam penelitian ini penulis menulis semua data yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian di lakukan, dan penulisan ini diuraikan dalam bentuk tulisan, kemudian di reduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok untuk penelitian. Setelah semua data sudah dipilih, tetapi kesimpulan yang ada masih di verifikasi secara terus menerus selama penelitian berlangsung.

I. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.1 : Jadwal Waktu Penelitian Tentang Peranan Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar Dalam Pemberdayaan Petani Karet Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2019															
		Juli-Agust				Sept-Okt				Nov-Des				Janua-Febr			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	X	X	x	X	x											
2	Seminar UP						X										
3	Perbaikan hasil seminar							x									
4	Penelitian Lapangan								x	x							
5	Pengelolaan Data										X	X					
6	Bimbingan Skripsi												X	x			
7	Ujian Skripsi														X		
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi															X	
9	Penyerahan Skripsi																X

Sumber : Modifikasi Penelitian 2019

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

1. Geografis

Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. Dengan terbentuknya Provinsi Riau berdasarkan undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 yang kemudian diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam wilayah Provinsi Riau.

Sejalan dengan bergulirnya era reformasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, Kabupaten Kampar dimekarkan menjadi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Kampar Ibukotanya Bangkinang, Kabupaten Pelalawan Ibukotanya Pangkalan Kerinci dan Kabupaten Rokan Hulu Ibukotanya Pasir Pangaraian. Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten yang berbatasan dengan Kota Pekanbaru. Kota Bangkinang sebagai Ibukota Kabupaten Kampar berjarak + 61 Km dari Kota Pekanbaru Ibukota Provinsi Riau dan merupakan Ibukota Kabupaten yang terdekat dengan Pekanbaru.

2. Kondisi Geografis

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 773.171 jiwa merupakan daerah yang

kedalaman rata-rata 7,7 M. Sungai Kampar membujur dari barat ke timur melewati beberapa kecamatan yaitu Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Bangkinang Seberang, Kampar, Kampar Timur, Rumbio Jaya, Kampar Utara, Siak Hulu dan Kampar Kiri. Selain itu terdapat pula Sungai Siak yang membujur dari barat ke timur, panjangnya \pm 90 Km dengan kedalaman rata-rata 8-12 M yang melintasi Kecamatan Tapung dan bermuara ke Selat Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Sungai-sungai tersebut di atas memiliki fungsi yang strategis dalam kehidupan ekonomi masyarakat, berfungsi sebagai prasarana perhubungan, sebagai sumber air bersih budi daya ikan, tempat mencari mata pencarian petani nelayan maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

3. Penduduk

Berdasarkan hasil Registrasi Penduduk Tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Kampar tercatat sebanyak 773.171 orang, yang terdiri dari penduduk laki-laki 397.107 jiwa dan wanita 376.064 jiwa. Dari 21 kecamatan yang ada dalam Kabupaten Kampar, Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kampar yaitu 333 jiwa/Km², diikuti oleh Kecamatan Kampar Utara, Rumbio Jaya, Bangkinang, Bangkinang Barat, Perhentian Raja, dan Kampar Timur. Sedangkan kecamatan yang relatif jarang penduduknya yaitu Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri, Kampar Kiri Hilir, XIII Koto Kampar, Gunung Sahilan, dan Tapung Hilir berkisar antara 9 s/d 51 jiwa/Km².

**Tabel IV.1 : Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar
Menurut Kecamatan Tahun 2017**

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kampar Kiri	915,33	15.187	14.257	29.444
Kampar Kiri Hulu	1.301,25	6.001	5.850	11.851
Kampar Kiri Hilir	759,74	5.918	5.423	11.341
Gunung Sahilan	597,97	10.117	9.154	19.271
Kampar Kiri Tengah	330,59	13.834	12.683	26.517
XIII Koto Kampar	732,40	12.150	11.653	23.803
Koto Kampar Hulu	674,00	9.597	9.104	18.701
Kuok	151,41	12.500	12.376	24.876
Salo	207,83	13.007	12.597	25.604
Tapung	1.365,97	48.251	44.202	92.453
Tapung Hulu	1.169,15	40.746	37.346	78.092
Tapung Hilir	1.013,56	30.465	28.125	58.590
Bangkinang Kota	177,18	19.608	19.168	38.776
Bangkinang	253,50	16.483	16.218	32.700
Kampar	136,28	25.030	25.051	50.081
Kampar Timur	173,08	12.099	11.849	23.948
Rumbio Jaya	76,92	8.617	8.444	17.061
Kampar Utara	79,84	8.448	8.593	17.041
Tambang	371,94	30.353	28.815	59.168
Siak Hulu	689,80	49.678	46.862	96.541
Perhentian Raja	111,54	9.028	8.297	17.315
Jumlah	11.289,28	397.107	376.064	773.171

Sumber Data : BPS Kampar 2017

B. Struktur Organisasi Gambaran Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar

Struktur organisasi juga merupakan faktor yang sama pentingnya dalam menentukan dan melihat cara kerja suatu organisasi, yang mana dapat dianalisa melalui strukturnya yang tergambar dan akan bisa diketahui bagian dan sub bagian, wewenang masing-masingnya serta hubungan koordinasi antar bagian dan sub bagian dalam pelaksanaan tugas serta tanggung jawab masing-masing berikut pembagian tugas berdasarkan spesialisasi yang pada akhirnya menggambarkan saling ketergantungan antar bagian dan sub bagian dalam suatu organisasi.

Dengan demikian cukup dapat dimaklumi bahwa struktur organisasi juga merupakan faktor yang penting adanya dalam perkembangan suatu organisasi untuk pertumbuhan kearah kemajuan yang pesat untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi, dimana akan menentukan mekanisme orang-orang yang bekerja dalam organisasi.

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 58 tahun 2016 Telah ditetapkan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar sebagai berikut :

7. Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
8. Sekretariat terdiri dari :
 - d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - e. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - f. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

9. Bidang Usaha Perkebunan terdiri dari :

- d. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan;
- e. Seksi Peredaran Hasil Perkebunan;
- f. Seksi Konservasi Lahan dan Penanggulangan Kebakaran.

10. Bidang Usaha Tani terdiri dari :

- d. Seksi Budidaya Tanaman Perkebunan;
- e. Seksi Sarana, Prasarana dan Pemasaran;
- f. Seksi Penyuluhan dan Perlindungan Tanaman.

11. Bidang Peternakan terdiri dari :

- d. Seksi Budidaya dan Pengembangan Peternakan;
- e. Seksi Pembibitan dan Produksi;
- f. Seksi Pakan dan Pengawasan Mutu.

12. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari:

- d. Seksi Kesehatan Hewan;
- e. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- f. Seksi Sumberdaya Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan.

C. Kedudukan Serta Uraian Tugas Pegawai Kantor Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar

1. Kedudukan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar

Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar merupakan unsur pelaksana pemerintah di daerah yang menyelenggarakan unsur

pemerintahan dalam bidang Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjadi urusan Rumah Tangga Daerah. Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah langsung dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

2. Uraian Tugas Pegawai Kantor Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar, Tugas Pokok dari Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud antara lain :

- (1) Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perkebunan dan bidang peternakan dan bidang hewan.
- (2) Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar

Pada pasal 5 ayat (1) Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar mempunyai rincian tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang usaha Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. Penyusunan rencana dan pelaksana program pengembangan di bidang Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. Melaksanakan pembinaan di bidang Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. Pengembangan sarana dan prasarana serta pengawasan sarana Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- f. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanam, bibit perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;

- g. Pembinaan produksi di bidang Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- h. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman, ternak dan hewan serta kemasyarakatan;
- i. Pembinaan pengelolaan dan pemasaran hasil perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;
- j. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis perkebunan;
- k. Pemantauan dan evaluasi di bidang Perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;
- l. Pelaksanaan administrasi Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;
- n. Pengelolaan UPT Dinas (UPTD).

b. Sekretariat

Sekretariat Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang Perkebunan dan Peternakan;
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggapan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. Penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Koordinasi dan penyusunan Perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara;
- f. Melaksanakan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- g. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
- h. Memberi petunjuk, membagi tugas dan bimbingan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar dan tertib;
- i. Pelaksanaan pengawasan terhadap disiplin pegawai, budaya bersih, budaya kerja dan budaya tertib;
- j. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat dinas;
- k. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum;
- l. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- m. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan;
- n. Melaksanakan pengelolaan administrasi program;
- o. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- p. Merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat kelengkapan kantor;

- q. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, arsip dan dokumen lainnya;
- r. Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas keamanan kantor;
- s. Pelaksanaan pengawasan terhadap disiplin pegawai, budaya bersih, budaya kerja dan budaya tertib;
- t. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat dinas dan mempersiapkan surat perintah tugas bagi pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas;
- u. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas;
- v. Memelihara, merawat, menjaga, dan mengawasi inventaris kantor;
- w. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
- x. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas;
- y. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- z. Menilai prestasi kinerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan penilaian prestasi kerja pegawai
- aa. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat terdiri dari :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Perencanaan dan Data;
- Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Setiap sub dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di bidang umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas dan fungsi :

- a. Melakukan penyusunan kegiatan rutin;
- b. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran sub bagian umum;
- c. Melakukan urusan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai;
- d. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
- f. Melakukan penyusunan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian umum;
- g. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan;
- h. Memberi petunjuk, membagi tugas dan bimbingan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
- i. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;

- j. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan.
- k. Mengecek tugas yang akan dikerjakan dengan membaca disposisi, isi surat masuk atau rencana kerja sub bagian untuk menentukan prioritas tugas;
- l. Mengagendakan, menomori dan mendistribusikan surat masuk dan surat keluar;
- m. Memeriksa, meneliti dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar;
- n. Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan keamanan kantor;
- o. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol dan merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas;
- p. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- q. Membuat konsep surat dinas yang menyangkut kepegawaian, berupa kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan masalah lainnya untuk menyelesaikan administrasi kepegawaian;
- r. Membuat konsep daftar urut kepangkatan kepegawaian dengan mempedomani data yang ada untuk disampaikan pada bagian kepegawaian daerah Kabupaten Kampar;
- s. Mengumpulkan daftar hadir pegawai secara langsung sebagai bahan informasi dan membuat rekapitulasi daftar hadir pegawai, dinas luar, sakit dan pegawai yang sedang cuti dengan mempedomani laporan dan daftar hadir yang ada sebagai bahan laporan pada atasan;

- t. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian dilingkungan dinas;
- u. Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- v. Menginventarisasi pegawai dan mengusulkan yang akan mengikuti pendidikan/pelatihan penjenjengandiklat pim IV, III, II dan diklat teknis fungsional serta pendidikan formal dengan cara menyampaikan surat edaran sebagai bahan persiapan test;
- w. Menginventarisasi nama-nama pegawai yang akan memperoleh penghargaan dan tanda jasa dengan cara meneliti perlengkapan persyaratan pemberian tanda jasa dengan cara membaca kelengkapan persyaratan yang diajukan untuk menilai layak atau tidaknya PNS yang bersangkutan mendapatkan penghargaan tanda jasa;
- x. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan penilaian prestasi kerja pegawai;
- y. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Data

Sub Bagian perencanaan dan data di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran serta pemantauan evaluasi, pelaporan dan data.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Data melaksanakan tugas dan fungsi :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran sub bagian perencanaan dan data;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dibidang perkebunan;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran dibidang perkebunan;
- d. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan program pelaporan;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
- f. Melakukan pengelolaan data perkebunan;
- g. Menyiapkan kebijakan teknis dimasing-masing bidang dan institusi kepala bidang terkait;
- h. Melaksanakan proses revisi Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA)/ Petunjuk Operasionan (PO) bilamana diperlukan;
- i. Menyelesaikan bahan laporan tahunan dinas institisi/ Kepala Bidang terkait;
- j. Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- k. Menyiapkan laporan LKjLP, Renstra, Renja, Penja dan IKU;
- l. Melaksanakan langkah-langkah persiapan pelaksanaan rencana kerja program kegiatan tahunan tersebut;
- m. Menyusun dokumen rencana kerja, rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;

- n. Menghimpun bahan dan data serta menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk diajukan ke Dinas Keuangan dan Asset/ Bappeda Kabupaten Kampar;
- o. Menyusun dokumen program kegiatan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan (APBD/ P);
- p. Menilai prestasi kinerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan penilaian prestasi kerja pegawai;
- q. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub bagian keuangan dan aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Aset Melaksanakan tugas dan fungsi :

- a. Melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- b. Melakukan urusan gaji pegawai;
- c. Melakukan administrasi keuangan;
- d. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;

- e. Melakukan penyusunan laporan keuangan prognosis, semesteran, dan laporan keuangan akhir tahun;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian dan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- g. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan rencana pemeliharaan barang unit (RPBU);
- h. Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- i. Melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Negara;
- j. Melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- k. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian keuangan dan aset;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugasnya;

c. Bidang Usaha Perkebunan

Bidang Usaha Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan, Peredaran hasil perkebunan dan konservasi lahan penanggulangan kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Perkebunan melaksanakan tugas dan fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha perkebunan;
- b. Memfasilitasi penyelesaian konflik usaha perkebunan;
- c. Penanganan gangguan usaha perkebunan;
- d. Memproses dan merekomendasikan izin usaha perkebunan;
- e. Menyusun rencana Penilaian Usaha Perkebunan (PUP);
- f. Melakukan pemantauan distribusi hasil produksi perkebunan;
- g. Melakukan pengawasan hasil produksi perkebunan;
- h. Penanganan pengendalian serangan OPT;
- i. Penanganan konservasi lahan perkebunan;
- j. Penanggulangan kebakaran lahan dan kebun;
- k. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan penilaian prestasi kerja pegawai;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala bidang usaha perkebunan dibidang pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan besar, swasta dan kemitraan usaha perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan melaksanakan tugas dan fungsi :

- a. Melaksanakan pelayanan perizinan/ rekomendasi usaha perkebunan;

- b. Melaksanakan pemantauan/ pembinaan dan pengawasan izin usaha perkebunan;
- c. Melakukan inventarisasi pengembangan usaha perkebunan besar Negara dan swasta;
- d. Pengembangan, pembinaan serta pengawasan kelembagaan dan kerjasama kemitraan usaha perkebunan;
- e. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan;
- f. Menyebarkan informasi peraturan perundang-undangan usaha perkebunan;
- g. Menyusun rencana kebutuhan perizinan/ rekomendasi usaha perkebunan;
- h. Memfasilitasi penyelesaian konflik usaha perkebunan besar Negara dan swasta;
- i. Melakukan penanganan gangguan usaha perkebunan besar Negara dan swasta;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Peredaran Hasil Perkebunan

Seksi Peredaran Hasil Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala bidang usaha perkebunan dibidang peredaran hasil perkebunan usaha perkebunan besar, swasta dan kemitraan usaha perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peredaran Hasil Perkebunan melaksanakan tugas dan fungsi :

- a. Melakuakn pengawasan dan pemantuan peredaran produksi hasil perkebunan;
- b. Melaksanakan inventarisasi dan menelaah terhadap suplai bahan baku pabrik kelapa sawit dan pabrik karet;
- c. Membuat pertimbangan teknis terhadap permohonan izin pabrik kelapa sawit dan karet tentang suplai bahan baku;
- d. Melaksanakan pengawasan peredaran hasil perkebunan antar daerah/wilayah;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup peredaran hasil perkebunan;
- f. Menyusun rencana kebutuhan biaya peredaran hasil perkebunan;
- g. Melaksanakan pemninaan terhadap petugas pengawas peredaran hasil perkebunan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Konservasi Lahan dan Penanggulangan Kebakaran

Seksi Konservasi lahan dan Penanggulangan Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala bidang usaha perkebunan tentang konservasi lahan dan penanggulangan kebakaran kebun.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konservasi lahn dan Penanggulangan Kebakaran melaksanakan tugas dan fungsinya :

- a. Melakukan bimbingan cara penggunaan, pengelolaan lahan dan pemanfaatan lahan atau tanah sesuai dengan kemampuan;
- b. Memberikan perlakuan yang normal dan sesuai dengan syarat-syarat yang diberikan;
- c. Melakukan bimbingan dan pengawasan tentang konservasi lahan dan / atau penanggulangan kebakaran kebun;
- d. Melakukan inventarisasi perkembangan dampak penggunaan lahan dan penanggulangan kebakaran kebun;
- e. Pemantauan, pemetaan serta analisa terhadap konservasi lahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan/ atau kebun;
- f. Pengembangan dan pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkembangan perkebunan;
- g. Menyusun rencana kebutuhan konservasi lahan dan penanggulangan kebakaran kebun;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Usaha Tani

Bidang Usaha Tani dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di Bidang Budidaya Tanaman Perkebunan, Sarana, Prasarana dan Pemasaran dan Penyuluhan dan Perlindungan Tanaman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Tani melaksanakan tugas dan fungsi :

- a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman perkebunan;
- b. Pembinaan dan pengawasan produsen benih, pengawasan mutu, dan sertifikasi benih dan atau bibit perkebunan;
- c. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap budidaya tanaman perkebunan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida;
- e. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi, pembangunan, rehabilitas Jalan Produksi Perkebunan;
- f. Pemanfaatan, perawatan serta penggunaan Alat dan Mesin Pertanian / Perkebunan;
- g. Melaksanakan perencanaan, bimbingan, pemanfaatan sumberdaya dan teknologi perkebunan;
- h. Melakuakan inventarisasi perkembangan usaha perkebunan besar dan perkebunan rakyat;
- i. Memeriksa dan menilai hasil kerja dan atau kinerja bawahan berdasarkan sasaran kinerja yang dicapai sebagai bahan daalam pembinaan dan peningkatan karir;
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas di bidangnya kepada Kepala Dinas;
- k. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan penilaian prestasi kerja pegawai;
- l. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1. Seksi Budidaya Tanaman Perkebunan

Seksi Budidaya Tanaman Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Usaha Tani pada seksi budidaya tanaman perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Budidaya Tanaman Perkebunan melaksanakan tugas dan fungsinya :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi Budidaya tanaman perkebunan meliputi penangkar benih, pengawasan mutu benih, sertifikasi benih, pengawasan budidaya tanaman perkebunan serta pengembangan tanaman;
- b. Penyiapan bahanperumusan kebijakan teknis lingkup perbenihan dan budidaya tanaman perkebunan;
- c. Pemantauan benih import perkebunan;
- d. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan;
- e. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan, peredaran dan penggunaan benih perkebunan;
- f. Melaksanakan bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan;
- g. Penetapan sentra produksi benih perkebunan;
- h. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul;
- i. Pengembangan system informasi perbenihan perkebunan;
- j. Pemberian pelayanan izin/ rekomendasi produksi benih perkebunan;

- k. Menyusun rencana kebutuhan dan standarisasi dan pengawasan mutu perkebunan;
- l. Pembinaan, monitoring, evaluasi serta pelaporan meliputi penangkar benih, pengawasan mutu dan sertifikasi benih, budidaya tanaman perkebunan serta pengembangan tanaman;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Sarana, Prasarana dan Pemasaran

Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Usaha Tani pada seksi sarana, prasarana dan pemasaran hasil tanaman perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud paya ayat (1), Seksi Sarana, Prasarana dan Pemasaran melaksanakan tugas dan fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi sarana, prasarana dan pemasaran meliputi alat mesin perkebunan lingkup pembinaan, pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk / pestisida, pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk / pestisida;
- b. Identifikasi kebutuhan dan pengembangan alat dan mesin perkebunan serta bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan, jalan kebun serta jalan produksi perkebunan;
- c. Pembinaan dan pengembangan penerapan alat mesin, jalan kebun dan jalan produksi perkebunan;

- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup sarana dan alat mesin perkebunan;
- e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup sarana dan alat mesin perkebunan;
- f. Penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup pengolahan hasil perkebunan dan pemasaran hasil perkebunan;
- g. Melakukan fasilitasi promosi komoditas perkebunan;
- h. Menyebarkan informasi pasar dan pengawasan harga komoditas perkebunan;
- i. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengolahan hasil perkebunan dan pemasaran hasil perkebunan;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Penyuluhan dan Perlindungan Tanaman

Seksi Penyuluhan dan Perlindungan Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Usaha perkebunan sebagai seksi penyuluhan dan perlindungan tanaman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan dan Perlindungan Tanaman melakukan tugas dan fungsi :

- a. Membantu kepala bidang dalam pelaksanaan bidang penyuluhan dan perlindungan tanaman perkebunan;

- b. Menyusun program dan rencana kerja seksi penyuluhan dan perlindungan tanaman;
- c. Mempersiapkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tentang penyuluhan dan perlindungan tanaman perkebunan;
- d. Mempersiapkan petunjuk teknis tentang penyuluhan dan perlindungan tanaman;
- e. Melaksanakan pengamatan, identifikasi, pengendalian dan menganalisa kerugian fenomena iklim terhadap tanaman perkebunan;
- f. Penyebaran informasi keadaan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan fenomena iklim serta rekomendasi pengendaliannya;
- g. Pelaksanaan peringatan dini serta pengamanan terhadap ketersediaan pestisida;
- h. Melakukan inventarisasi perkembangan dampak dari penggunaan lahan pembangunan perkebunan dengan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT);
- i. Menyusun rencana kebutuhan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
- j. Melaksanakan pengawasan, peredaran serta penyimpanan pestisida serta efek samping penggunaan pestisida;
- k. Memberi binaan kepada bawahan baik secara lisan maupun tulisan;
- l. Membuat SKP pegawai sesuai dengan tupoksi penyuluhan;
- m. Melaporkan seluruh pelaksana tugas kepada kepala bidang;

- n. Bimbingan dan pengawasan terhadap dampak dari pembangunan perkebunan;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Peternakan

Bidang Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengembangan produksi, perbibitan dan pengolahan pakan, pembinaan budidaya dan pengembangan ternak, pengembangan Sumber daya dan Kelembagaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan melaksanakan tugas dan fungsi:

- a. Menyiapkan kebijaksanaan dalam rangka peningkatan, pembinaan produksi dan pengelolaan SDG serta pengembangan teknologi, Perbibitan Ternak, Pengembangan Pakan Ternak,
- b. Menyiapkan kebijaksanaan dalam rangka peningkatan, pembinaan budidaya, pengembangan ternak, Peningkatan Sumber Daya dan kelembagaan peternakan dalam Rangka Peningkatan Populasi dan Mengembangkan rumpun / galur ternak.
- c. Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan produksi dan pengembangan teknologi, Perbibitan Ternak, Pengembangan Pakan ternak, pengawasan mutu, kegiatan budidaya ternak, Peningkatan Sumber Daya dan kelembagaan di bidang Peternakan.

- d. Menyusun rencana dan program di Bidang Peternakan;
- e. Membuat laporan pelaksanaan tugas di bidangnya kepada Kepala Desa,
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Seksi Budidaya dan Pengembangan Peternakan

Seksi Budidaya dan Pengembangan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Budidaya dan Pengembangan Peternakan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Budidaya dan pengembangan Peternakan melaksanakan tugas dan fungsi:

- a. Melakukan kegiatan dalam rangka Peningkatan Populasi Ternak
- b. Mengembangkan rumpun/ galur ternak
- c. Menyusun pedoman teknis pengadaan ternak dan redistribusi;
- d. Melaksanakan penyebaran dan redistribusi ternak;
- e. Melaksanakan pendataan, analisa data dan administrasi ternak;
- f. Menyusun rencana kebutuhan ternak, jenis, rumpun / galur dan prosedur pengadaan;
- g. Melakukan identifikasi calon lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan;
- h. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi penyebaran ternak;
- i. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kualitas sumber daya dan Kelembagaan Peternakan meliputi sumber daya alam dan aparatur.

- j. Melaksanakan fungsi penyuluhan peternakan dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
- k. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha di bidang peternakan;
- l. Pengelolaan dan pengembangan kelembagaan serta keterangan;
- m. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Peternakan;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan.

2. Seksi Perbibitan dan Produksi

Seksi Perbibitan dan Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Perbibitan dan Produksi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbibitan dan Produksi melaksanakan tugas dan fungsi:

- a. Melakukan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan;
- b. Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan produksi dan reproduksi ternak;
- c. Melaksanakan pengendalian, penyediaan dan peredaran benih / bibit ternak;
- d. Menyusun pedoman teknis produksi, reproduksi ternak;
- e. Membuat standar pembibitan ternak yang akan digunakan oleh peternak, pengaturan penggunaan bibit unggul;

- f. Melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap usaha peternakan dan produksi peternakan dalam rangka pengembangan usaha dan peningkatan hasil produksi;
- g. Memfasilitasi peternak dalam rangka memperoleh modal usaha di bidang peternakan;
- h. Melakukan survey izin usaha di bidang Peternakan;
- i. Melakukan inventarisasi usaha di bidang Peternakan;
- j. Melakukan Pengawasan Produk Hewan;
- k. Melakukan analisa data Informasi Pasar;
- l. Menyusun pedoman teknis pengelolaan hasil di bidang peternakan;
- m. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan pengawasan pengolahan pemasaran hasil peternakan dan bahan asal ternak;
- n. Memfasilitasi peningkatan keragaman produk hasil ternak dalam rangka perolehan nilai tambah bagi pelaku usaha.
- o. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan mutu olahan hasil peternakan;
- p. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pasar ternak;
- q. Membuat laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Peternakan;
- r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan sesuai dengan bidangnya.

3. Seksi Pakan dan Pengawasan Mutu

Seksi Pakan dan Pengawasan Mutu dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas Menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Pakan dan Pengawasan Mutu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pakan dan Pengawasan Mutu melaksanakan tugas dan fungsi:

- a. Melakukan penyediaan dan peredaran bibit hijauan pakan ternak;
- b. Menyusun standarisasi pakan ternak;
- c. Menyusun pedoman teknis yang menyangkut pengadaan pakan ternak;
- d. Melakukan pengujian mutu pakan ternak;
- e. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap peredaran dan penggunaan pakan, imbuhan pakan dan hijauan pakan ternak;
- f. Meningkatkan SDM dibidang pakan ternak;
- g. Pengembangan lahan pengembalaan umum;
- h. Membuat laporan pelaksanaan tugas dibidangnya kepada Kepala Bidang Produksi dan Teknologi;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi dan Teknologi sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang Mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengembangan serta peningkatan dalam upaya pencegahan,

pemberantasan dan perlindungan penyakit hewan (P4H), Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dan pelayanan kesehatan hewan, sarana dan prasarana kesehatan hewan serta pengawasan Obat Hewan (POH).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner melaksanakan tugas dan fungsi:

- a. Menyiapkan kebijakan dalam rangka pengembangan, pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pelayanan kesehatan hewan, pengawasan obat hewan dan sarana prasarana kesehatan hewan menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengkoordinir pelaksanaan pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pelayanan kesehatan hewan, pengawasan obat hewan serta pengadaan sarana dan prasarana kesehatan hewan;
- c. Melaksanakan pembinaan dalam hal pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pelayanan kesehatan hewan pengawasan obat-obatan serta sarana dan prasarana kesehatan hewan;
- d. Melakukan pembinaan terhadap medik veteriner dan paramedik veteriner;
- e. Memimpin penyelenggaraan tugas / pekerjaan dilingkungan bidang kesehatan hewan dan kesmavet di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar;

- f. Membuat laporan pelaksanaan tugas dan pekerjaan di Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibutuhkan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Seksi Kesehatan Hewan

Seksi Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Hewan melaksanakan tugas dan fungsi :

- a. Menyiapkan petunjuk teknis dalam rangka pencegahan, pemberantasan penyakit hewan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Melakukan monitoring dan surveillance, terhadap kemungkinan terjadinya wabah dan penyebaran penyakit hewan;
- c. Mengumpulkan, menyiapkan dan mengolah data yang berkenaan dengan penyakit hewan, serta membuat peta penyebaran penyakit hewan;
- d. Mengkoordinir pengambilang spesimen penyakit hewan guna pemeriksaan ke laboratorium;
- e. Menyusun rencana dan mengkoordinir pelaksanaan, pengamatan, penanggulangan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan;

- f. Mengkoordinir secara teknis penanggulangan kejadian kasus penyakit (wabah);
- g. Melaksanakan pengawasan lalu lintas ternak dan hewan untuk kesehatan hewan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner melaksanakan tugas dan fungsi :

- a. Menyiapkan Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. Melakukan pembinaan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- c. Mengkoordinir pengawasan kesehatan lingkungan pada usaha di bidang peternakan;
- d. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap usaha pemotongan hewan, unggas, usaha unit pengolahan daging dan hasil produk hewan;
- e. Melaksanakan pengawasan lalu lintas bahan asal dan kotoran ternak;
- f. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha Bahan Asal Hewan (BAH) dari Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH);

- g. Mengawasi penyediaan dan peredaran daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) baik oleh pemerintah maupun swasta dan perorangan;
- h. Melakukan pendataan dan pembinaan terhadap pelaku usaha Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH);
- i. Mengkoordinir pengambilan sampel Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH);
- j. Mengkoordinir pelaksanaan fungsi karantina terhadap Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) menurut peraturan yang berlaku;
- k. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penerapan kesejahteraan hewan (Kesrawan);
- l. Membuat laporan pelaksanaan tugas di seksi kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibutuhkan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Sumber Daya Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan

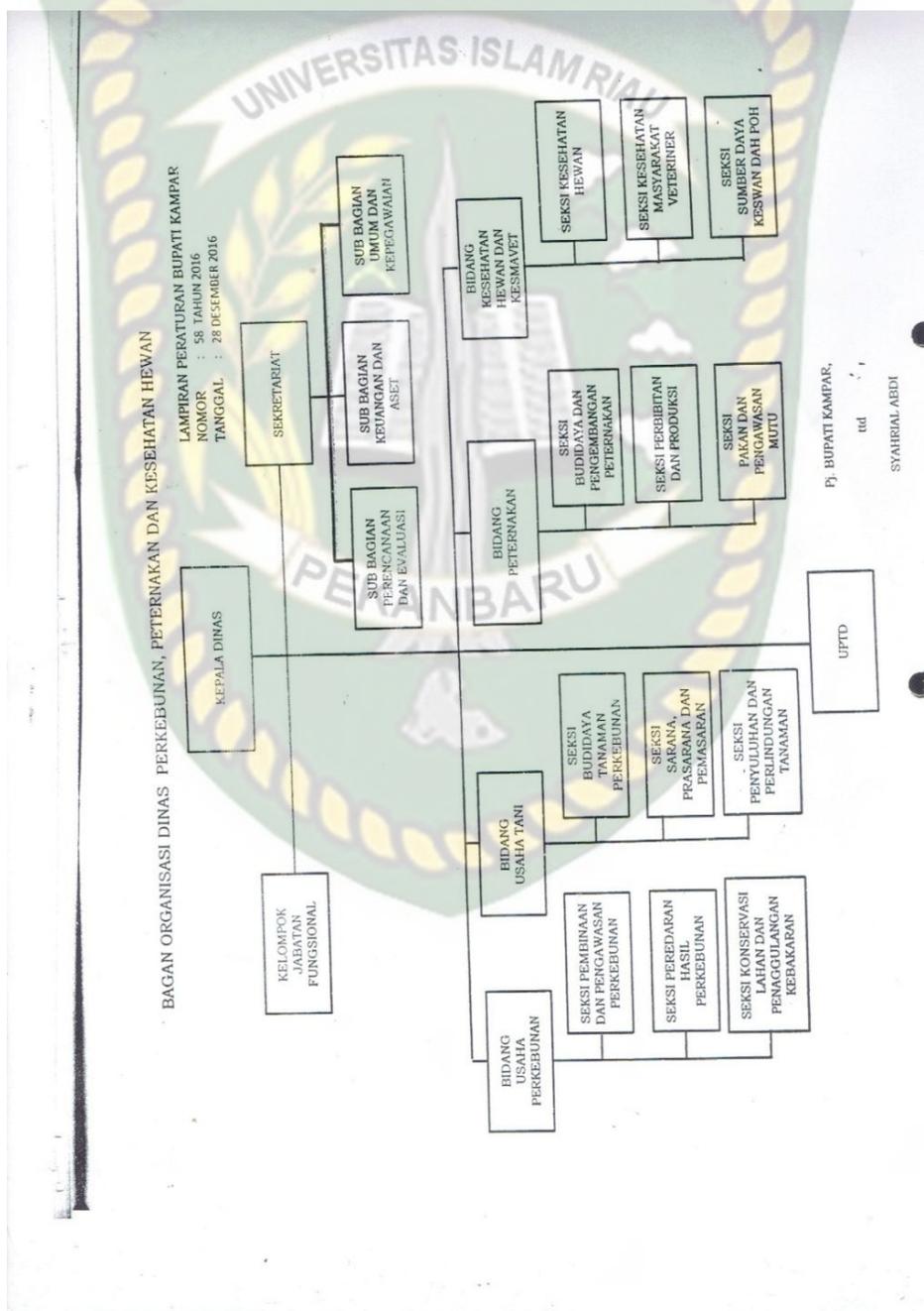
Seksi Sumber Daya Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyusun rencanakerja dan anggaran Seksi Sumber Daya Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sumber Daya Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan melaksanakan tugas dan fungsi :

- a. Menyusun kebutuhan sarana, prasarana pelayanan kesehatan hewan sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyusun kebutuhan obat-obatan, vaksin, sera, sediaan biologis dan sediaan bahan kimia lainnya untuk pelayanan kesehatan hewan;
- c. Mendistribusi dan mengawasi sarana, prasarana, obat-obatan, vaksin, sera, sediaan biologis dan sediaan kimia lainnya untuk pelayanan kesehatan hewan;
- d. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengawasan obat hewan dan bahan kimia lainnya untuk pelayanan kesehatan hewan;
- e. Mandata pelaku usaha obat hewan (depo, toko obat hewan, poultry shop dll) di wilayah kabupaten Kampar;
- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan terhadap peredaran, penyimpanan dan penggunaan obat-obat hewan yang dilakukan oleh pelaku usaha obat hewan (depo, toko obat hewan, poultry shop dll);
- g. Melakukan pembinaan, bimbingan dan pemberdayaan pada unit institusi pelayanan kesehatan hewan sesuai dengan fungsinya (antara lain Puskesmas, Klinik Hewan, Laboratorium Kesehatan Hewan dll);
- h. Mengkoordinir peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan hewan;
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas atau pekerjaan diseksinya kepada bidang kesehatan hewan dan kesmavet.

D. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di kantor Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar yang berkaitan dengan pemberdayaan petani di Kecamatan Kampar Kiri. Otonomi daerah yang ditetapkan dalam pelaksanaan pemerintah di Indonesia merupakan pelopor adanya kegiatan pemberdayaan petani yang merupakan salah satu fungsi dari Pemerintah Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar yang merupakan kegiatan pemerintah daerah dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten/Kota dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan dan perkembangan antara wilayah di Kabupaten Kampar.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara sehingga diperoleh data mengenai identitas informan berdasarkan jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan para responden. Selain itu juga diperoleh data-data primer maupun data sekunder yang berkaitan dengan Peranan Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar Dalam Pemberdayaan Petani Karet Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

A. Identitas Informan

Penelitian yang telah dilakukan ini merupakan penilaian mengenai pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar kepada

petani karet khususnya di Kecamatan Kampar Kiri, dengan demikian untuk memperoleh data yang selanjutnya akan dianalisa sebagai bahan informasi pemberdayaan petani karet tersebut maka perlu mencari data yang akurat dari informan yang mengetahui tentang pelaksanaan pemberdayaan petani karet tersebut.

Dalam rangka menentukan hasil penelitian yang sangat berperan penting adalah informan, karena dari informan sebagian besar data yang diperoleh dalam penelitian. Sehubungan dengan penelitian Peranan Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar Dalam Pemberdayaan Petani Karet Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

informan dalam penelitian yang telah dilakukan ini terdiri dari 1 (satu) orang PPL Kecamatan Kampar Kiri, 1 (satu) orang kepala KUB (Kelompok Usaha Bersama) Kecamatan Kampar Kiri, dan 1 (satu) orang anggota kelompok petani KUB sebagai orang yang menerima pemberdayaan dari penyuluhan, pengarahan dan bimbingan, serta 1 (satu) orang petani mandiri. Dengan wawancara tersebut sehingga diperoleh data mengenai identitas informan berdasarkan jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan serta pekerjaan para informan.

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin merupakan unsur genetika dari para informan PPL Kecamatan Kampar Kiri, kepala KUB (Kelompok Usaha Bersama) Kecamatan Kampar Kiri, Ketua Kelompok Tani dan Anggota Kelompok Tani. Untuk lebih

jelas identitas informan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah berikut ini :

Tabel V.1 : Klasifikasi Informan

No	Informan	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	PPL Kecamatan Kampar Kiri	1	-
2	Kepala KUB Kecamatan Kampar Kiri	1	-
4	Anggota Kelompok Petani KUB	2	-
5	Petani mandiri	1	-
	Jumlah	5	-
	Presentase	100%	0

Sumber data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2019

Berdasarkan tabel V.1 diatas dapat diketahui bahwa responden penelitian didominasi dengan jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 5 (lima) orang dan perempuan tidak ada.

Dalam sebuah penelitian, jenis kelamin informan tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruhnya jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola pikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah penelitian. Dalam penelitian ini jenis kelamin informan sangat didominasi oleh kaum Laki-laki. Dalam penelitian ini 4 orang informan laki-laki dan yang perempuan tidak ada.

2. Usia Informan

Sebuah penelitian tentunya tidaklah memberikan batasan usia informan dalam melakukan penelitiannya. Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa usia

merupakan salah satu yang cenderung membentuk kedewasaan pola pikir manusia. Walaupun kedewasaan pola pikir tidaklah bisa sepenuhnya ditentukan oleh usia seseorang, namun kebanyakan manusia pola pikirnya tergantung pada usianya.

Pada penelitian ini terdapat beberapa keberagaman usia informannya :

Tabel V.2 : Identitas Informan Berdasarkan Umur

No	Umur Tahun	Kelompok Informan		Jumlah	Presentase
		PPL dan KUB	Kelompok Petani dan Petani Mandiri		
1	<30	-	-	-	-
2	31-40	-	-	-	-
3	41-50	1	-	1	20%
4	>50	1	3	4	80%
Jumlah		2	3	5	100%

Sumber data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2019

Berdasarkan tabel V.2 dapat diketahui identitas informan berdasarkan umur adalah dari 4 (empat) orang yang dijadikan informan sebanyak 1 (satu) orang atau 25% berumur 41-50 tahun, sebanyak 3 (tiga) orang atau 75% berumur lebih dari 50 tahun.

Berdasarkan identitas informan menurut tingkat umur dapat dikatakan bahwa sebagian besar informan yang digunakan dalam penelitian ini tergolong usia produktif dan dewasa dalam berfikir. Selain itu informan tersebut cukup berpengalaman dalam pemberdayaan Petani Karet.

3. Pendidikan Informan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jawaban yang diberikan oleh informan, semakin tinggi pendidikan informan maka semakin baik pula jawaban serta penjelasan yang diberikan terhadap rangkain pertanyaan yang disajikan oleh peneliti, dalam wawancara penelitian yang telah dilakukan,

dari hasil penelitian tentang Peranan Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar Dalam Pemberdayaan Petani Karet Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar maka dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan para informan yang masuk dalam ruang lingkup penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.3 : Klasifikasi Informan Penelitian Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Kelompok Informan		Jumlah	Presentase
		PPL dan KUB	Kelompok Petani dan Petani Mandiri		
1	Tidak sekolah	-	-	-	-
2	SD/Sederajat	-	2	2	40%
3	SMP/Sederajat	-	1	1	20%
4	SMA/Sederajat	1	-	1	20%
5	S1	1	-	1	20%
Jumlah		2	3	5	100%

Sumber data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2019

Berdasarkan tabel V.1 dapat diketahui Tingkat Pendidikan informan dari 4 (empat) orang yang dijadikan informan sebanyak 2 (dua) orang atau 40% berpendidikan SD/Sederajat, sebanyak 1 (satu) orang atau 20% berpendidikan SMP/Sederajat, sebanyak 1 (satu) orang atau 20% berpendidikan SMA/Sederajat, sebanyak 1 (satu) orang atau 20% berpendidikan S1.

4. Pekerjaan Informan

Untuk informasi mengenai data pekerjaan, penulis menanyakan pertanyaan ini kepada masyarakat kelompok petani dan petani mandiri serta dalam bentuk identitas informan dalam wawancara. Sedangkan untuk para Pelaksana Pemberdayaan, penulis hanya menanyakan jabatan dalam menjalankan roda pemerintahan di Kantor Perkebunan Kecamatan Kampar Kiri, sehingga klasifikasi informan berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.4 : Klasifikasi Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Kelompok Informan		Jumlah	Presentase
		PPL dan KUB	Kelompok Petani dan Petani Mandiri		
1	Petani	-	3	3	60%
2	Wiraswasta	-	-	-	-
3	PNS	1	-	1	20%
4	Pegawai Honorer	1	-	1	20%
Jumlah		2	3	5	100%

Sumber data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2019

Berdasarkan tabel V.4 dapat diketahui Pekerjaan informan berdasarkan jenis pekerjaan dari 5 (lima) orang yang dijadikan informan sebanyak 3 (tiga) orang atau 60% bekerja sebagai Petani, sebanyak 1 (satu) orang atau 20% bekerja sebagai PNS, sebanyak 1 (satu) orang atau 20% bekerja sebagai Pegawai Honorer.

B. Peranan Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar Dalam Pemberdayaan Petani Karet Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Pada bagian ini akan dibahas dan dijelaskan bagaimana tanggapan informan mengenai Peranan Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar Dalam Pemberdayaan Petani Karet Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, dengan melakukan wawancara kepada setiap informan yang telah ditetapkan.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemberdayaan Edi Suharto (2006 : 67-68) dimana indikator-indikator tersebut adalah :

1. Pemungkinan
2. Penguatan
3. Perlindungan
4. Penyokongan
5. Pemeliharaan

Berikut ini dijelaskan hasil tanggapan dari informan terhadap indikator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti telah melaksanakan wawancara kepada 5 (lima) orang yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang diberikan kepada informan semuanya sama yang sesuai dengan judul penelitiannya.

a. Pemungkinan

Menurut Edi Suharto (2006 : 67-68) pemungkinan adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat – sekat kultural dan struktural yang menghambat.

Berdasarkan definisi diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pemungkinan disini merupakan suatu usaha yang dilakukan dalam membebaskan masyarakat dari kurang pengetahuan, terutama pengetahuan dalam bertani karet.

Pemungkinan yang sebagaimana yang dijelaskan diatas juga diperlukan dalam pemberdayaan petani karet, khususnya di Kecamatan Kampar Kiri. Berdasarkan indikator pemungkinan mencakup beberapa item-item untuk dijadikan pertanyaan bagi informan. Untuk melihat pemungkinan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar terhadap pemberdayaan petani karet di Kecamatan Kampar Kiri, maka penulis melakukan wawancara dengan petani karet di Kecamatan Kampar Kiri.

Dalam menciptakan suasana baru bagi para petani ketika melakukan kegiatan berinovasi bertani agar pengetahuan para petani bertambah. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan bapak Hidayat, SP.

Petugas lapangan PPL Kecamatan Kampar Kiri, pada tanggal 15 Januari 2020, jam 09.15 WIB. Berikut wawancara penulis dengan responden :

“Untuk menciptakan suasana dan memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk berinovasi dalam bertani karet khususnya, kami mempersilahkan saja masyarakat itu berinovasi dalam bertani karet karena sekarang informasi sudah sangat canggih, seperti penggunaan internet, google dan youtub. Selain daripada buku-buku teknis (petunjuk teknis dari petugas lapangan PPL Dinas Perkebunan)”

Ungkapan diatas menjelaskan bahwa PPL Kecamatan Kampar Kiri Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar memberikan kebebasan kepada para petani karet dalam berinovasi sehingga mereka bisa memiliki pengetahuan tambahan dalam hal bertani karet khususnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan bapak Hidayat, SP. Petugas lapangan PPL Kecamatan Kampar Kiri, pada tanggal 15 Januari 2020 jam 09.15 WIB. Berikut adalah tanggapannya :

“Dengan cara mengadakan penyuluhan dan bimbingan yang bersifat teknis serta membangun kepada kelompok petani karet dengan baik dan benar, untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat petani karet dengan ilmu pengetahuan.”

Berdasarkan ungkapan diatas dapat menjelaskan bahwa PPL Kecamatan Kampar Kiri Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar melakukan penyuluhan dan bimbingan kepada para petani karet dengan baik dan benar agar bisa meningkatkan taraf kehidupan masyarakat petani dalam hal ekonomi.

Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan mengenai indikator pemungkinan, penulis menyimpulkan bahwa pemungkinan yang dilakukan oleh PPL Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar yang ada di Kecamatan Kampar Kiri mengenai kegiatan pemungkinan penyuluhan dapat dilakukan dengan baik, hanya saja ada beberapa petani yang tidak dapat tindakan langsung dari Dinas Perkebunan seperti petani karet mandiri.

b. Penguatan

Menurut Usman (2005:73) mengemukakan penguatan adalah segala bentuk respon apakah bersifat verbal maupun non verbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku murid, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi si penerima (anak didik) atas perbuatannya sebagai tindak dorongan ataupun koreksi.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penguatan adalah respon yang diberikan oleh seorang guru atau atasan terhadap suatu tingkah laku siswa atau seseorang dengan tujuan agar dapat memungkinkan berulangnya kembali tindak seseorang tersebut. Pemberian penguatan sangat penting dilakukan oleh atasan kepada bawahan guna untuk meningkatkan pengetahuan seseorang dalam bidangnya.

Penguatan menurut Edi Suharto (2006:67-68) adalah memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

Penguatan yang sebagaimana yang dijelaskan diatas juga diperlukan dalam pemberdayaan petani karet, khususnya di Kecamatan Kampar Kiri. Berdasarkan indikator penguatan mencakup beberapa item-item untuk dijadikan pertanyaan bagi informan. Untuk melihat penguatan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar terhadap pemberdayaan petani karet di Kecamatan Kampar Kiri, maka penulis melakukan wawancara dengan petani karet di Kecamatan Kampar Kiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan bapak Hidayat, SP. Petugas lapangan PPL Kecamatan Kampar Kiri, pada tanggal 15 Januari 2020 jam 09.15 WIB. Berikut wawancara penulis dengan responden :

“Dengan cara mengadakan bimbingan dan penyuluhan dalam berbudidaya bertani karet”.

Wawancara selanjutnya dengan bapak Suyatno Kepala KUB Kecamatan Kampar Kiri, tanggal 29 Januari 2020, jam 14.30 WIB, berikut tanggapannya :

“Membuat dan melakukan perkumpulan para anggota kelompok petani dan memberikan arahan serta bimbingan kepada mereka dengan cara penyampaian poin-poin penting dalam menanam karet”.

Ada juga pendapat dari bapak Samsudin, anggota kelompok petani KUB Kecamatan Kampar Kiri, tanggal 30 Januari 2020, jam 15.00 WIB. Berikut tanggapannya :

“selama saya jadi anggota kelompok petani KUB ini, saya sangat merasakan perubahan dalam melakukan kegiatan bertani karet seperti saya selalu mendapatkan bimbingan setiap melakukan perkumpulan petani karet disini

dimana yang tidak pernah saya tahu sudah saya ketahui dengan bergabung bersama kelompok petani KUB ini”.

Dari kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa petani karet yang tergabung dalam anggota KUB mendapatkan bimbingan dan penyuluhan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan bapak Hidayat, SP. Petugas lapangan PPL Kecamatan Kampar Kiri, tanggal 15 Januari 2020 jam 09.15 WIB. Berikut adalah petikannya yang menyatakan :

“dengan mengadakan kunjungan secara rutin dan memberikan semangat motivasi agar petani karet mau menanam, memelihara dan menyadap karet dengan benar kemudian mengadakan pemasaran bersama secara berkelompok”.

Wawancara selanjutnya dengan bapak Suyatno Kepala KUB Kecamatan Kampar Kiri, tanggal 29 Januari 2020 jam 14.30 WIB, berikut tanggapannya :

“sama halnya dengan pendapat bapak Hidayat dengan mengadakan kunjungan secara rutin dan memberikan semangat motivasi agar petani karet paham dalam melakukan kegiatan bertani karet”

Ada juga pendapat dari bapak Samsudin, anggota kelompok petani KUB Kecamatan Kampar Kiri, tanggal 30 Januari 2020 jam 15.00 WIB. Berikut kutipannya :

“saya secara pribadi selalu mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan yang dimana saya dan kawan-kawan yang masuk dalam anggota kelompok petani KUB ini diberi bimbingan dan arahan cara bertani karet yang baik”.

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa Dinas Perkebunan telah melakukan penyuluhan dan bimbingan terhadap petani karet yang ada di Kecamatan Kampar Kiri.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai indikator penguatan dapat disimpulkan bahwa Dinas Perkebunan melakukan penyuluhan dan bimbingan terhadap para petani karet yang ada di Kecamatan Kampar Kiri dan para petani karet yang tergabung dalam anggota kelompok petani KUB merasakan dampak yang baik ketika mengikuti kegiatan penyuluhan dan bimbingan dari Dinas Perkebunan.

c. Perlindungan

Menurut Edi Suharto (2006:67-68) Perlindungan adalah melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

Jadi perlindungan disini adalah peran Dinas Perkebunan dalam melindungi masyarakat / petani karet dalam hal persaingan hasil maupun harga agar menjadi seimbang.

Perlindungan yang sebagaimana yang dijelaskan diatas juga diperlukan dalam pemberdayaan petani karet, khususnya di Kecamatan Kampar Kiri. Berdasarkan indikator perlindungan mencakup beberapa item-item untuk

dijadikan pertanyaan bagi informan. Untuk melihat perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar terhadap pemberdayaan petani karet di Kecamatan Kampar Kiri, maka penulis melakukan wawancara dengan petani karet di Kecamatan Kampar Kiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan bapak Hidayat, SP. Petugas lapangan PPL Kecamatan Kampar Kiri, tanggal 15 Januari 2020 jam 09.15 WIB. Berikut wawancara penulis dengan responden :

“tertindas disini maksudnya adalah dalam hal pemasaran yang sering dialami oleh para petani dimana harga jual beli yang dilakukan petani terkadang tidak menentu harganya, jadi kami dari Dinas Perkebunan mengadakan kelompok tani dan pemasaran bersama agar mendapatkan harga jual harga karet yang tinggi dari petani karet lain”

Begitupun juga menurut Suyatno Kepala KUB Kecamatan Kampar Kiri, tanggal 29 Januari 2020, jam 14.30 WIB, berikut tanggapannya :

“saya selalu melakukan pengecekan harga karet setiap minggunya sebelum karet dijual ke induksemang”.

Ada juga pendapat dari bapak Samsudin, anggota kelompok petani KUB Kecamatan Kampar Kiri, tanggal 30 Januari 2020 jam 15.00 WIB Berikut tanggapannya :

“kami yang anggota kelompok petani KUB selalu diberikan informasi harga penjualan sebelum kami melakukan transaksi jual beli dengan sang pembeli karet, dimana kepala KUB yang bertanggung jawab dalam mencari informasi harga karet”

Dari tanggapan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kepala KUB yang bertanggung jawab terhadap harga jual karet dan para kelompok petani KUB tidak bisa menjual karetnya secara bebas karena terikat akan ketentuan yang telah ditetapkan oleh kepala KUB dan Dinas Perkebunan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan bapak Hidayat, SP. Petugas lapangan PPL Kecamatan Kampar Kiri, tanggal 15 Januari 2020 jam 09.15 WIB. Berikut adalah petikannya yang menyatakan :

“dengan cara memberikan bimbingan dan arahan kepada para petani dalam membuat bahan olah karet yang bersih dan tidak dicampur atau terkontaminasi dengan bahan-bahan yang lain. Seperti tatal (sagat) / kayu, agar mutu dari karet itu baik (K3 = kadar karet kering) yang tinggi dan supaya kelompok petani dapat bersaing dalam harga karet ditingkat pedagang / mitra (orang pembeli)”.

Wawancara selanjutnya dengan bapak Suyatno Kepala KUB Kecamatan Kampar Kiri, 29 Januari 2020_14.30 WIB, berikut tanggapannya :

“dengan cara memberikan para petani arahan agar membuat karet bersih dari kayu ataupun tatal yang bisa membuat nilai harga karet seimbang dari petani lain”

Ada juga pendapat dari bapak Samsudin, anggota kelompok petani KUB Kecamatan Kampar Kiri, tanggal 30 Januari 2020 jam 15.00 WIB. Berikut tanggapannya :

“kami para anggota kelompok petani karet sering diberikan arahan untuk membuat karet bersih dari tatal atau kayu agar harga jual karet tidak jatuh”.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai indikator perlindungan, penulis dapat menyimpulkan para anggota kelompok tani dibimbing dan diberi arahan supaya membuat karet bersih agar bisa menjual karet dengan harga tinggi dan bisa bersaing dengan seimbang dengan para kelompok petani lainnya.

d. Penyokongan

Penyokongan menurut Edi Suharto (2006:67-68) adalah memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas – tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

Jadi penyokongan disini adalah kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar dalam pemberdayaan petani karet di Kecamatan Kampar Kiri, dimana masyarakat diberikan bimbingan dan dukungan dari Dinas Perkebunan agar masyarakat mampu menjalankan tugas yang telah diterima, dimana masyarakat dibimbing untuk mandiri.

Penyokongan yang sebagaimana yang dijelaskan diatas juga diperlukan dalam pemberdayaan petani karet, khususnya di Kecamatan Kampar Kiri. Berdasarkan indikator penyokongan mencakup beberapa item-item untuk dijadikan pertanyaan bagi informan. Untuk melihat penyokongan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar terhadap pemberdayaan petani karet di Kecamatan Kampar Kiri, maka penulis melakukan wawancara dengan petani karet di Kecamatan Kampar Kiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan bapak Hidayat, SP. Petugas lapangan PPL Kecamatan Kampar Kiri, tanggal 15 Januari 2020 jam 09.15 WIB. Berikut wawancara penulis dengan responden :

“menurut saya melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap masyarakat petani karet di Kecamatan Kampar Kiri, ada suka dan dukanya. Pertama kalau seandainya petani itu berhasil / kebunnya berhasil kami dari petugas perkebunan sangat senang dan bangga dari meningkatnya taraf hidup ekonomi para petani karet itu sendiri. Susahnya ada petani yang tidak mau mengikuti anjuran teknis dari petugas lapangan perkebunan untuk menanam dan merawat kebun karetnya sehingga dibiarkan begitu saja kebun karetnya terbengkalai”

Wawancara selanjutnya dengan bapak Suyatno Kepala KUB Kecamatan Kampar Kiri, tanggal 29 Januari 2020, jam 14.30 WIB, berikut petikannya :

“sama seperti pendapat dari bapak Hidayat, petugas perkebunan memberikan penyuluhan dan bimbingan terhadap para petani karet sehingga mereka (petani) memahami lebih dalam soal bertani karet”.

Ada juga pendapat dari bapak Samsudin, anggota kelompok petani KUB Kecamatan Kampar Kiri, tanggal 30 Januari 2020, jam 15.00 WIB. Berikut tanggapannya :

“saya sangat merasakan dampak dari adanya pemberian bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan para petugas perkebunan kepada kami kelompok tani, salah satu nya bertambah pengetahuan dan ilmu kami soal tata cara menanam karet dan menghasilkan karet yang bernilai baik dipasaran”

Ada juga pendapat lain dari bapak Khairul Anam, anggota kelompok petani KUB Kecamatan Kampar Kiri, tanggal 29 Maret 2020, jam 16.10 WIB.

Berikut tanggapannya :

“selama saya jadi anggota kelompok petani KUB, saya mendapatkan bimbingan dan penyuluhan dari Disbun, dan sudah saya terapkan ilmu yang saya dapat selama penyuluhan tersebut dilakukan, tetapi sekarang saya sudah tidak aktif lagi di KUB karena merosotnya harga karet yang jatuh”

Dari kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa para kelompok petani mendapatkan bimbingan dari para petugas perkebunan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan bapak Hidayat, SP. Petugas lapangan PPL Kecamatan Kampar Kiri, tanggal 15 Januari 2020, jam 09.15 WIB. Berikut adalah tanggapannya yang menyatakan :

“dengan cara memberikan pembinaan dan penyuluhan serta motivasi agar petani karet mau memelihara dan merawat perkebunan karetnya dari hama seperti tapir, landak, kerbau. Ada juga penyakit batang karet yang harus tindaki secara cepat seperti jamur akar putih dan pembusukan akar maupun batang”.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai indiktaor penyokongan, penulis menyimpulkan bahwa Dinas Perkebunan secara rutin memberikan pembinaan dan penyuluhan langsung kepada para petani karet. Penulis menyimpulkan hal tersebut berdasarkan observasi dan hasil wawancara yang dilakukan informan.

e. Pemeliharaan

Pemeliharaan menurut O'Connor (2001:407) adalah suatu kegiatan untuk memelihara dan menjaga fasilitas yang ada serta memperbaiki. Melakukan penyesuaian atau pergantian yang diperlukan untuk mendapat suatu kondisi operasi produksi agar sesuai dengan perencanaan yang ada.

Pemeliharaan menurut Edi Suharto (2006:67-68) adalah memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan kesimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Jadi pemeliharaan disini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar dalam pemberdayaan petani karet di Kecamatan Kampar Kiri dimana kegiatannya berupa memelihara dan menjaga keseimbangan pemasaran petani karet agar nilai harga jual karet yang dilakukan petani karet mampu stabil.

Pemeliharaan yang sebagaimana yang dijelaskan diatas juga diperlukan dalam pemberdayaan petani karet, khususnya di Kecamatan Kampar Kiri. Berdasarkan indikator pemeliharaan mencakup beberapa item-item untuk dijadikan pertanyaan bagi informan. Untuk melihat pemeliharaan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar terhadap pemberdayaan petani karet di Kecamatan Kampar Kiri, maka penulis melakukan wawancara dengan petani karet di Kecamatan Kampar Kiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan bapak Hidayat, SP. Petugas lapangan PPL Kecamatan Kampar Kiri, tanggal 15 Januari 2020, jam 09.15 WIB. Berikut wawancara penulis dengan responden :

“dengan cara melakukan pertemuan secara rutin biasanya sekali dalam sebulan, membentuk kelompok tani (terpilih ketua, sekretaris, bendahara dan anggota) biar lebih jelas pertemuannya. Melakukan pertemuan persiapan lahan untuk menanam karet, melakukan evaluasi pertemuan menjelang bibit atau saprodi (sarana produksi) datang seperti (pupuk, belerang, racun rumput)”

Wawancara selanjutnya dengan bapak Suyatno Kepala KUB Kecamatan Kampar Kiri, tanggal 29 Januari 2020, jam 14.30 WIB, berikut petikannya :

“dengan cara mengadakan pertemuan antara petugas perkebunan dan anggota kelompok petani, dulu itu pertemuannya setiap minggunya dihari jumat dengan mengadakan arisan para kelompok petani, tetapi karena sekarang karet harganya murah ditambah lagi musim hujan tak menentu, sudah banyak anggota kelompok tani karet pindah lahan ke sawit, maka dari itu sekarang pertemuan antara kelompok petani dengan petugas perkebunan sudah mulai jarang”

Ada juga pendapat dari bapak Samsudin, anggota kelompok petani KUB Kecamatan Kampar Kiri, tanggal 30 Januari 2020, jam 15.00 WIB. Berikut tanggapannya :

“satu atau dua tahun yang lalu, kegiatan pertemuan antara petugas perkebunan dengan kelompok petani karet disini selalu aktif diadakan setiap bulannya, tetapi sekarang sudah jarang karna harga karet yang murah ditambah lagi banyak para petani karet yang pindah lahan ke sawit”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan bapak Hidayat, SP. Petugas lapangan PPL Kecamatan Kampar Kiri, tanggal 15 Januari 2020, jam 09.15 WIB. Berikut adalah petikannya yang menyatakan :

“disini Dinas Perkebunan tidak bisa membuat keseimbangan yang tetap karena harga karet yang turun naik serta kondisi cuaca yang tak menentu, kemudian dengan adanya pemerintah (Dinas Perkebunan) dapat menyalurkan bantuan seperti bibit, saprodi, dan bantuan perkebunan lainnya.”

Wawancara selanjutnya dengan bapak Suyatno Kepala KUB Kecamatan Kampar Kiri, tanggal 29 Januari 2020, jam 14.30 WIB, berikut tanggapannya :

”menurut saya dengan adanya pembentukan kelompok petani, para petani akan kuat, bersemangan dan berinovasi serta bisa bersaing dengan petani yang tidak berkelompok/petani mandiri”

Ada juga pendapat dari bapak Samsudin, anggota kelompok petani KUB Kecamatan Kampar Kiri, tanggal 30 Januari 2020, jam 15.00 WIB. Berikut tanggapannya :

“disini saya sebagai anggota kelompok sangat merasakan keuntungan dari diadakannya bimbingan dan penyuluhan dari petugas perkebunan”

Ada juga pendapat lain dari bapak Khairul Anam, anggota kelompok petani KUB Kecamatan Kampar Kiri, tanggal 29 Maret 2020, jam 16.10 WIB. Berikut tanggapannya :

“pada tahun 2017, saya masih aktif ikut jadi anggota KUB dan saya juga ikut semua kegiatan yang diadakan oleh Disbun karna waktu itu saya masih fokus dan aktif berkebun karet. Tetapi setelah saya pikir, kalau saya Cuma bergantung

kepada karet yang harganya sudah murah, nanti anak istri saya mau dikasih makan apa, makanya saya mengalihkan lahan kebun saya dari karet ke sawit karna sawit pekerjaannya tidak terlalu berat bagi saya”

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai indiktaor pemeliharaan, penulis menyimpulkan bahwa dahulunya kegiatan pertemuan antara petugas perkebunan dan kelompok petani karet berjalan dengan baik dan rutin dilakukan, tetapi sekarang kegiatan tersebut sudah jarang terlaksana dikarenakan kurangnya keaktifan para kelompok petani dalam kegiatan tersebut.

Adapun wawancara yang peneliti lakukan dengan seorang petani karet mandiri, yaitu bapak toni, berikut pertanyaan dan pernyataannya :

Bagaimana menurut bapak dalam memilih menjadi petani karet mandiri dibandingkan bergabung dengan kelompok petani karet yang dibuat oleh Dinas Perkebunan ?

“alasan saya disini tidak memilih ikut bergabung dari kelompok petani karet yang telah dibuat oleh Dinas Perkebunan adalah saya tidak mau terikat harga yang telah ditetapkan, terkadang harga karet tinggi diluar tetapi induk semang yang telah ditetapkan dari petugas perkebunan tersebut menetapkan harga standar, memang saya disini tidak mendapat penyuluhan dan bimbingan langsung dari Dinas Perkebunan tetapi saya bisa melakukannya dengan cara belajar mandiri, kan sekarang sudah banyak buku-buku tentang penanaman karet yang baik, intinya saya tidak mau terikat akan aturan dari Dinas Perkebunan”

Dari kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan dari pemberdayaan masyarakat dalam hal bertani karet berjalan dengan baik, tetapi

sejak beberapa tahun terakhir kegiatan penyuluhan dari Dinas Perkebunan sudah jarang dikarenakan anggaran dari pemerintah ditambah lagi harga karet sudah turun maka dari itu banyak para petani karet yang pindah ke sawit, karna sawit tidak tergantung akan cuaca. Keuntungan dari ikut kelompok petani karet adalah adanya uang kas yang bisa dipergunakan ketika diperlukan oleh para anggota seperti ketika ada kebutuhan mendesak seperti sakit ataupun anak mau masuk sekolah, kekurangannya yaitu menjual karet tidak bisa bebas karena telah ditentukan siapa induk semang tempat menjual karet yang di hasilkan oleh petani sehingga berapa harga karet yang telah ditetapkan oleh induk semang dari Dinas Perkebunan itulah nanti harga yang didapat sama para anggota kelompok petani karet. Lain halnya dengan petani karet mandiri dimana mereka bisa bebas menjual karet sesuai harga yang paling tinggi, tetapi petani karet mandiri tidak memiliki uang kas ketika ada keperluan mendesak seperti sakit. Kegiatan penyuluhan sekarang sudah kurang aktif karena hal-hal tersebut.

C. Hambatan-Hambatan dan Kendala Peranan Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar Dalam Pemberdayaan Petani Karet Kecamatan Kampar Kiri

Dalam hal Peranan Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar Dalam Pemberdayaan Petani Karet Kecamatan Kampar Kiri termasuk kategori baik, dimana pemberdayaan petani karet sudah mulai merata. Seperti diadakannya pertemuan antara petugas perkebunan dengan kelompok-kelompok petani karet yang ada di Kecamatan Kampar Kiri.

Tetapi ada juga hambatan yang dirasakan dalam Peranan Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar Dalam Pemberdayaan Petani Karet Kecamatan Kampar Kiri seperti berikut :

1. Terbatasnya / minimnya anggaran Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar untuk melakukan kegiatan pemberdayaan petani sehingga sudah jarang kegiatan pemberdayaan dilakukan, dimana rencana untuk melakukan kegiatan pemberdayaan sudah ada tetapi terhambat oleh dana / anggaran yang kurang;
2. Sulitnya mengumpulkan masyarakat petani karena kesibukkan masing-masing petani untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;
3. Kurangnya sumber daya manusia penyuluh / PPL di Kecamatan Kampar Kiri, sehingga kegiatan pemberdayaan sulit dilakukan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai analisis Peranan Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar Dalam Pemberdayaan Petani Karet Kecamatan Kampar Kiri. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran-saran untuk bahan masukan bagi pihak terkait terutama Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar sebagai berikut :

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah bahwa Peranan Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar Dalam Pemberdayaan Petani Karet Kecamatan Kampar Kiri menurut petugas perkebunan (Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar) telah menjalankan tugasnya dalam melakukan kegiatan penyuluhan dalam hal pemberdayaan masyarakat dibidang petani karet. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Kampar dalam bidang karet untuk sekarang ini tidak aktif dilakukan karena terkendala oleh anggaran yang kurang dan petani karet yang telah banyak beralih lahan ke kebun kelapa sawit.

Hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini atau kendala dalam kegiatan pemberdayaan perkebunan di Kecamatan Kampar Kiri yang sering dihadapi kenyataannya dilapangan mengalami berbagai masalah juga baik dari kegiatan penyuluhan perkebunan itu sendiri maupun petani. Permasalahan yang dihadapi adalah kecilnya alokasi anggaran dana pemerintah daerah untuk kegiatan penyuluhan, sehingga mengakibatkan mobilitas para penyuluh perkebunan menjadi rendah.

Kemudian petani sulit untuk bisa berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan. Hal tersebut disebabkan karena masing-masing petani

mempunyai kesibukan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sehingga petani belum sepenuhnya menerapkan informasi pemberdayaan yang disampaikan dari penyuluh perkebunan. Hal ini akan berdampak terhadap hasil efektivitas produksi yang belum maksimal.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian maka disini penulis ingin memberikan saran bagi Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar dalam melakukan pemberdayaan perkebunan khususnya di Kecamatan Kampar Kiri, yaitu untuk memperbaiki kelemahan yang ada, agar tidak terulang lagi dimasa yang akan datang.

Kepada dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar, disarankan supaya :

1. Anggaran dananya ditambah karena anggaran dana sebelumnya kurang sehingga dalam melakukan kegiatan pemberdayaan kepada petani karet di Kecamatan Kampar Kiri terhambat;
2. Menambah anggota penyuluh / PPL di Kecamatan Kampar Kiri agar dalam melakukan kegiatan pemberdayaan petani bisa seimbang antara penyuluh dan masyarakat yang diberdayakan.

Kepada masyarakat petani karet disarankan untuk :

1. Kepada masyarakat agar meluangkan waktunya untuk ikut kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar dalam hal pemberdayaan petani karet;
2. Agar masyarakat ikut serta dan aktif ketika adanya kegiatan penyuluhan dari Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku :

- Adiwilangga, Anwas. 1992. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Rineke Cipta, Jakarta
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung
- Ambar, Teguh Sulistiyani. 2011. *Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gava Media
- Dunn, W. N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua* (terjemahan Samodra Wibawa, Diah Asitadani, Erwan Agus Purwanto). Gajah mada University Press.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Faizah, Nurul. 2005. *Serikat Petani Pasundan (SPP).; Agriculture - Indonesia.; Agriculture - Economic Aspects – Piramedia - Jakarta*
- Kartono dan Kartini. 2009. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Komaruddin.(2006). *Ensiklopedia Manajemen*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1-2. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nugroho, D. Riant. *Kebijakan Publik ; Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka
- Rauf, Rahyunir dan Munaf, Yusri. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*. Pekanbaru. Zanafa Publishing.

- Rivai, V. Mulyadi, D. 2008. *Kepemimpinan dan perilaku organisasi*. Jakarta: Rajawali pers.
- Santoso, 2005. *Skripsi Ilmu Pemerintahan Sohidin*. Pekanbaru: Perpustakaan Fisipol UIR.
- Sedarmayanti. 2003. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Penerbit Ilham Jaya, Bandung.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. PT Rineka Cipta. Jakarta. Sugiyono, (2008).
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangaun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama. Bandung
- Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: STKSPRESS.
- Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Refika Aditama, Bandung
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat, Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana
- Zulkifli, dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi Dan Kertas Kerja Mahasiswa*, Pekanbaru. Badan Penerbit Fisipol UIR

Jurnal :

Gleydis Susanti Oroh. 2014. Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian di Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa

Puput Hardiani. 2015. Peran Dinas Pertanian dan Kehutanan dalam Pemberdayaan Petani Karet di Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan

Sohidin. 2017. Analisis Pelaksanaan Fungsi Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pembinaan Pertanian (Studi di Kecamatan Rimba Melintang)

Dokumentasi :**Peraturan Perundang-Undangan**

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Revitalisasi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (RPPK)
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Petani
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 273/KPTS/OT.160/4/2007, Pada Tanggal 11 Juni 2005 Tentang Pedoman Penumbuhan Pengembangan Kelompok Tani
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/KPTS/OT.160.4.2007, Pada Tanggal 13 April 2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (8) Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar